

BUNGA RAMPAI PENDIDIKAN

Perspektif Inovasi dan Kebijakan

Buku ini menyajikan beberapa konsep dasar tentang inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan meliputi definisi umum, proses inovasi, strategi inovasi, keputusan inovasi, hambatan inovasi, dan dampak inovasi. Selanjutnya secara khusus buku ini menghadirkan inovasi kurikulum yang telah dialami oleh Indonesia dalam kurun waktu tertentu seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Berbasis Sekolah, dan Kurikulum 2013. Arahun kurikulum tersebut merujuk pada inovasi pembelajaran. Karena interaksi pendidikan tidak lepas dari kebermaknaan pembelajaran di dalam kelas. Maka, diperlukan pembelajaran yang berinovasi meliputi pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis sekolah, dan pembelajaran berbasis tematik. Sementara itu, inovasi pendidikan terjabarkan dalam kebijakan-kebijakan tertentu khususnya kebijakan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Kebijakan yang direncanakan dan selanjutnya diimplementasi, pada akhirnya untuk mengetahui keefektifan kebijakan yang diterapkan, maka diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi pendidikan sebagai bagian dari rangkaian inovasi pendidikan dalam rangka menganalisis kebermaknaan kebijakan pendidikan yang diimplementasikan dalam ranah pendidikan.

Penerbit Lakeisha

Jl. Jatiwidi Boyadi Km 07
Srikaton, Pucangmilan, Tulung, Klalen
Telp/Wa: 08787880832
fb: Penerbit Lakeisha
Instagram: penerbit.lakeisha
Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com



9 786236 948705

BUNGA RAMPAI PENDIDIKAN Perspektif Inovasi dan Kebijakan

Dr. Meidawati Suswandari, M.Pd.

BUNGA RAMPAI PENDIDIKAN

Perspektif Inovasi dan Kebijakan

Penerbit
LAKEISHA



Dr. MEIDAWATI SUSWANDARI, S.Pd., M.Pd.

BUNGA RAMPAI PENDIDIKAN

Perspektif Inovasi dan Kebijakan



**Penerbit Lakeisha
2021**



BUNGA RAMPAI PENDIDIKAN Perspektif Inovasi dan Kebijakan

Penulis:

Dr. MEIDAWATI SUSWANDARI, S.Pd., M.Pd.

Editor: Andriyanto, S.S., M.Pd.

Layout : Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Desain Cover : Tim Lakeisha

Cetak I Maret 2021

15 cm × 23 cm, 117 Halaman

ISBN: 978-623-6948-70-5

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha
(**Anggota IKAPI No.181/JTE/2019**)

Redaksi

Jl. Jatinom Boyolali, Srikaton, Rt.003, Rw.001,

Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website : www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia dari dampak pandemic Covid-19 menjadikan kebijakan bersifat isidental dan berubah-ubah menyesuaikan situasi dan kondisi. Munculnya perubahan tersebut merupakan bagian dari dinamika di masyarakat. Hal inilah yang tidak memungkirkan munculnya inovasi untuk tetap berjalan dalam mempertahankan kualitas/mutu pendidikan di Indonesia. Standar mutu pendidikan di Indonesia merupakan salah satu pijakan bagi dunia kerja dan tantangan kecakapan hidup di masyarakat. Pendidikan bermula dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan sekolah tinggi. Pendidikan yang berjenjang tersebut memotivasi kita sebagai generasi penerus untuk senantiasa memantapkan dinamisme proses pendidikan melalui inovasi dalam dunia pendidikan. Inovasi secara garis besar membawa satuan pendidikan dan para pelaksana pendidikan untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif.

Oleh karena itu, sebagai solusi memahami sejauh mana pola pikir inovasi, di dalam buku ini menyajikan beberapa konsep dasar tentang inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan meliputi definisi umum, proses inovasi, strategi inovasi, keputusan inovasi, hambatan inovasi, dan dampak inovasi. Selanjutnya secara khusus buku ini menghadirkan inovasi kurikulum yang telah dialami oleh Indonesia dalam kurun waktu tertentu seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Berbasis Sekolah, dan Kurikulum 2013. Arah kurikulum tersebut merujuk pada inovasi pembelajaran. Karena interaksi pendidikan tidak lepas dari kebermaknaan

pembelajaran di dalam kelas. Maka, diperlukan pembelajaran yang berinovasi meliputi pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis sekolah, dan pembelajaran berbasis tematik. Sementara itu, inovasi pendidikan terjabarkan dalam kebijakan-kebijakan tertentu khususnya kebijakan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Kebijakan yang direncanakan dan selanjutnya diimplementasi, pada akhirnya untuk mengetahui keefektifan kebijakan yang diterapkan, maka diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi pendidikan sebagai bagian dari rangkaian inovasi pendidikan dalam rangka menganalisis kebermaknaan kebijakan pendidikan yang diimplementasikan dalam ranah pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Untuk meningkatkan kualitas secara isi dan penyajiannya, penulis mengharapkan saran dan kritik positif dari pembaca sebagai bahan perbaikan pada penerbitan yang akan datang.

Sukoharjo, Maret 2021
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I INOVASI PENDIDIKAN.....	1
A.Konsep Dasar Inovasi	2
B. Proses Inovasi.....	3
C. Tahapan Keputusan Inovasi	5
D.Strategi Inovasi	9
E. Hambatan Inovasi.....	11
F. Refleksi Inovasi Pendidikan di Indonesia.....	14
G.Uji Kompetensi	15
BAB II INOVASI KURIKULUM	16
A.Kurikulum Berbasis Kompetensi	20
B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	28
C. Kurikulum 2013	35
D.Refleksi Inovasi Kurikulum di Indonesia	42
E. Uji Kompetensi.....	43
BAB III INOVASI PEMBELAJARAN	44
A.Pembelajaran Berbasis Kompetensi.....	46
B. Pembelajaran Berbasis Sekolah	50
C. Pembelajaran Tematik.....	56
D.Refleksi Inovasi Pembelajaran di Indonesia.	62
E. Uji Kompetensi.....	63

BAB IV KEBIJAKAN PENDIDIKAN	64
A.Kebijakan Pendidikan Dasar	80
B. Kebijakan Pendidikan Menengah.....	84
C. Kebijakan Pendidikan Tinggi.....	86
D.Studi Kasus Kebijakan Pendidikan di Indonesia	91
E. Uji Kompetensi.....	92
BAB V MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN	
PENDIDIKAN.....	93
A.Konsep Dasar Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.....	93
B. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	98
C. Refleksi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	
Pendidikan di Indonesia.	106
D.Uji Kompetensi	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
INDEKS	116
TENTANG PENULIS	117

BAB I

INOVASI PENDIDIKAN

Kompetensi Dasar :

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami makna inovasi pendidikan.
2. Mengidentifikasi proses inovasi.
3. Mengidentifikasi tahap-tahap keputusan inovasi.
4. Menjabarkan strategi inovasi.
5. Mengidentifikasi hambatan dan dampak inovasi.
6. Menyebutkan contoh inovasi pendidikan di Indonesia.

Membangun dunia pendidikan sudah sewajarnya menjadi tugas kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Apalagi persaingan secara regional, nasional, dan internasional semakin menuntut kita menjadi bangsa yang unggul, kompeten, dan berkarakter. Kerangka pembangunan pendidikan salah satunya dengan adanya inovasi dalam dunia pendidikan. Inovasi di dunia pendidikan akan terwujud melalui adanya strategi pendidikan yang direncanakan dengan matang. Adanya strategi yang matang dalam pendidikan maka akan berakhir maksimal pula hasil yang diperoleh dalam mewujudkan pendidikan itu

sendiri. Salah satu perencanaan matang dalam strategi pendidikan adalah melalui inovasi di dalam dunia pendidikan. Inovasi sebagai

rancangan awal yang diharapkan mampu mengakhiri hasil ketercapaian yang optimal dalam dunia pendidikan.

A. Konsep Dasar Inovasi

Istilah inovasi memiliki beberapa pengertian. Menurut Everett M. Rogers (2003: 12) bahwa inovasi merupakan rangkaian ide, praktek, atau proyek baru yang saling terkait dengan unit individu satu dengan lainnya yang didalamnya terdapat proses adopsi. Sedangkan menurut Pervaiz dan Charles D (Endang W, 2008: 2) bahwa inovasi tidak terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga meliputi sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, inovasi menjadi rangkaian perubahan yang direncanakan dan bertujuan untuk memperbaiki praktek-praktek. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa inovasi adalah suatu pengenalan hal-hal yang baru, masukan, pembaharuan, penemuan baru dari hal-hal yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode maupun alat (Depdikbud, 1990: 333).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, inovasi adalah rangkaian ide, praktek atau proyek yang bersifat baru, pembaharuan, perubahan baik berupa benda, sikap, dan perilaku yang teradopsi dalam kehidupan masyarakat.

Inovasi yang merupakan kumpulan beberapa ide tersebut, secara kompleks memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Keunggulan relatif (*relative advantage*) yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat di ukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya inovasi.

2. Kompatibilitas (*compatibility*) yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.
3. Kerumitan (*complexity*) yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.
4. Kemampuan diujicobakan (*triability*) yaitu suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Jadi agar dapat dengan cepat di adopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulannya.
5. Kemampuan untuk diamati (*observability*) yaitu mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya bila sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat (Everett M. Rogers, 2003: 10).

B. Proses Inovasi

Adanya penemuan baru maupun pengembangan dari penemuan baru yang ada di masyarakat dalam tahapannya terjadi proses adopsi. Proses adopsi sebagai ujicoba dalam rangka penerimaan ide atau penemuan baru yang akan diterapkan selanjutnya dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, suatu inovasi memiliki tahapan atau proses inovasi tertentu. Adapun proses atau tahapan inovasi, meliputi:

1. *Envisioning* yaitu proses ini meliputi penyamaan pandangan mengenai masa depan untuk membentuk tujuan berinovasi. Visi ini harus meliputi ukuran, inovasi apa yang dilakukan untuk

organisasi, ruang lingkup inovasi, dan bagaimana visi tersebut sesuai dengan visi organisasi.

2. *Activating* yaitu penyampaian visi ke publik agar tercapai sebuah komitmen terhadap visi sehingga strategi akan relevan dengan visi begitupula dengan implementasi visi.
3. *Supporting* yaitu tahapan ini merupakan upaya seorang pemimpin tidak hanya di dalam memberikan perintah dan instruksi kepada bawahan, namun juga keterampilan di dalam menginspirasi bawahannya untuk bertindak inovatif. Dalam hal ini diperlukan kepekaan pemimpin dalam memahami bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin hendaknya bersikap empatik.
4. *Installing* yaitu pada tahapan ini merupakan tahapan implementasi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kompleksitas strategi yang diperlukan dalam berinovasi dan konsekuensi yang diterima.
5. *Ensuring* yaitu kegiatan yang meliputi *monitoring* dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan sudah tepat waktu dan sesuai rencana. Apabila tidak sesuai dengan rencana maka rencana alternatif apa yang dapat diambil. Selain itu, tahapan ini juga dipergunakan untuk memantau apakah hasil sesuai dengan yang diharapkan sehingga apabila tidak, maka akan dibuat langkah penyesuaian.
6. *Recognizing* yaitu tahapan ini meliputi segala macam bentuk penghargaan terhadap bentuk inovasi. Hal tidak hanya meliputi *reward* dalam bentuk finansial tapi dapat juga berbentuk kepercayaan, ucapan terima kasih yang tulus, serta bentuk promosi.

Sementara itu, inovasi dibagi menjadi 3 kategori, antara lain:

- a. Inovasi Administrasi (*administrative innovation*), berhubungan dengan struktur organisasi dan proses administrasi yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas dasar pekerjaan

dari sebuah organisasi dan berhubungan secara langsung dengan manajemen perusahaan.

- b. Inovasi Teknologi (*technology innovation*), berhubungan dengan teknologi produk, jasa, dan proses produksi.
- c. Inovasi Proses/Operasional (*process innovation*), berhubungan dengan elemen baru yang diperkenalkan pada sebuah produksi perusahaan atau operasi jasa, input bahan baku, spesifikasi tugas, pekerjaan dan informasi, dan peralatan yang digunakan, untuk produksi sebuah produk atau membuat jasa pelayan (Pervaiz dan Charles D, 2010: 22).

C. Tahapan Keputusan Inovasi

Inovasi menjadi bagian penting dalam perubahan dan pembaharuan di dalam masyarakat. Sementara itu inovasi yang dapat diterima atau bahkan teradopsi memiliki beberapa tahapan dalam keputusannya. Keputusan inovasi menjadi titik pijak sebuah perubahan dan pembaharuan yang selanjutnya berdampak baik atau buruk, diterima atau ditolak dari suatu inovasi. Sehingga sebelum adanya penerimaan atau penolakan inovasi terdapat penyebaran inovasi. Penyebaran inovasi biasa diistilahkan dengan kata —

ll. Difusi adalah proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara para anggota suatu sistem sosial (Everret M. Rogers, 2003: 5-6). Maka, difusi sebagai sebuah proses dimana penemuan baru disebarkan atau dikomunikasikan pada sekelompok komunitas atau masyarakat tertentu.

Penyebaran pesan inovasi melalui komunikasi tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum inovasi dinyatakan untuk diterima (adopsi) atau ditolak. Berikut ini tahapan-tahapan dalam memutuskan inovasi meliputi:

Pertama, tahap pengetahuan yaitu pengadopsi harus memahami apa kuantitas suatu inovasi untuk mengamankan, bagaimana menggunakannya dengan benar dan sebagainya.

Kedua, tahap persuasi yaitu seseorang biasanya ingin tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti "apa konsekuensi inovasi?" "Apa yang akan kelebihan dan kekurangan dalam situasi saya?". Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa individu menjadi lebih psikologis terlibat dengan inovasi pada tahap persuasi. Setelah pengetahuan dan persuasi tahap, individu menghadapi dengan adopsi atau penolakan inovasi.

Ketiga, tahap keputusan yaitu sebagai tahapan inovasi untuk memutuskan membuat penuh penggunaan suatu inovasi sebagai tindakan yang terbaik atau penolakan untuk tidak beradaptasi dengan inovasi. Pada tahap keputusan, individu memilih untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Jika sebuah inovasi memiliki dasar percobaan parsial, biasanya diadopsi lebih cepat, karena sebagian besar individu pertama kali ingin mencoba inovasi. Namun, penolakan juga bisa muncul dalam keputusan inovasi. Rogers menyatakan dua jenis penolakan, yaitu : penolakan aktif dan penolakan pasif. Dalam situasi penolakan aktif, individu mencoba inovasi dan berpikir tentang mengadopsinya, namun kemudian ia memutuskan untuk tidak mengadopsinya. Sehingga sebuah keputusan penghentian, yang menolak sebuah inovasi setelah mengadopsi itu sebelumnya, dapat dianggap sebagai tipe aktif penolakan. Sedangkan, penolakan pasif (atau non-adopsi) posisi, individu tidak berpikir tentang mengadopsi inovasi sama sekali.

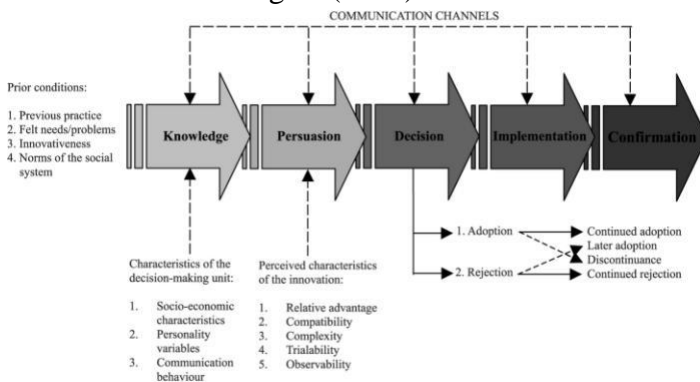
Keempat, tahap pelaksanaan yaitu tahapan inovasi ketika seorang individu menempatkan inovasi mulai digunakan. Pada tahapan pelaksanaan atau implementasi ini, proses keputusan inovasi menjadi proses mental mengenai konsekuensi yang diharapkan dari inovasi. Sehingga akan

muncul pertanyaan "Bagaimana cara menggunakannya?", "Bagaimana cara kerjanya?", "Apa masalah operasional aku mungkin menghadapi, dan bagaimana saya bisa menyelesaikannya? ".

Kelima, tahap konfirmasi yaitu individu mencari penguatan keputusan inovasi yang telah dibuat atau membalikkan keputusan sebelumnya untuk mengadopsi atau menolak inovasi jika terkena pesan yang bertentangan tentang inovasi. Pada tahap konfirmasi individu mencari dukungan untuk keputusannya. Penghentian keputusan inovasi bisa terjadi dalam tahap konfirmasi. Ada 2 jenis penghentian dalam konfirmasi, antara lain

- 1) Pengganti penghentian yaitu individu menolak inovasi untuk mengadopsi inovasi ke arah yang lebih baik lagi.
- 2) Penghentian kekecewaan yaitu individu menolak inovasi karena dia tidak puas dengan kinerjanya. Alasan lain untuk jenis penghentian keputusan karena inovasi tidak memenuhi kebutuhan individu (Everret M. Rogers, 2003: 15-16).

Berikut ini skema pengambilan keputusan inovasi menurut Everett M. Rogers (1995).



Source: After Rogers (1995)

Gambar 1.2. Keputusan Inovasi (Everett M. Rogers,1995).

Menyimpulkan kelima tahapan di atas, bahwasanya pengambilan keputusan inovasi merupakan suatu langkah

dimana seorang individu melewati dari pengetahuan pertama dari suatu inovasi, untuk membentuk sikap terhadap inovasi, untuk keputusan untuk mengadopsi atau menolak, untuk pelaksanaan ide baru, dan untuk mengkonfirmasi keputusan ini mengenai inovasi yang ditolak atau diterima oleh individu tersebut.

Di samping itu, keputusan inovasi memperhatikan beberapa alasan kenapa seseorang mengambil sebuah keputusan inovasi tertentu, antara lain:

- a) Keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi, berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu (seseorang) secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Meskipun dalam hal ini individu mengambil keputusan itu berdasarkan norma sistem sosial atau hasil komunikasi interpersonal dengan anggota sistem sosial yang lain. Jadi hakekat pengertian keputusan inovasi opsional ialah individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi.
- b) Keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi, berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Semua anggota sistem sosial harus mentaati keputusan bersama yang telah dimuatnya. Misalnya, atas kesepakatan warga masyarakat di setiap RT untuk tidak membuang sampah di sungai, yang kemudian disahkan pada rapat antar ketua RT dalam satu wilayah RW. Maka konsekuensinya semua warga RW tersebut harus mentaati keputusan yang telah dibuat tersebut, walaupun mungkin secara pribadi masih ada beberapa individu yang masih berkeberatan.
- c) Keputusan inovasi otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi, berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan,

status, wewenang atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Para anggota sama sekali tidak mempunyai pengaruh atau peranan dalam membuat keputusan inovasi (Udin Syaefudin S, 2013: 41-42)

D. Strategi Inovasi

Dalam rangka menyebarkan sebuah inovasi diperlukan adanya strategi yang matang agar hasil yang diperoleh juga optimal sesuai yang diharapkan. Berikut ini terkategori 4 strategi yang diambil dalam menyebarkan sebuah inovasi (Udin Syaefudin S, 2013: 63-68), antara lain:

1. Strategi Fasilitatif adalah strategi dengan merubah fasilitas yang telah ada untuk menjadi lebih maksimal dan lebih maju serta maju. Perubahan dalam penyediaan fasilitas dengan maksud agar program inovasi berjalan dengan mudah dan lancar.
2. Strategi Pendidikan berkaitan dengan strategi pengajaran kembali (*re-education*). Menurut Zaltman (Udin Syaefudin S, 2013: 65) menggunakan istilah *re-education* bahwa dengan strategi ini memungkinkan seseorang harus belajar lagi mengenai sesuatu yang dilupakan yang pada dasarnya telah dipelajarinya sebelumnya untuk kembali lagi mempelajari tingkah laku atau sikap yang baru. Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efisien dan efektif, perlu mempertimbangkan aspek sebagai berikut:
 - a. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi bahwa adanya inovasi tidak diharapkan tidak ingin secepat berubah.
 - b. Strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang perlu dikuasai dan sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Selain itu, adanya inovasi digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan

antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Efektif berikutnya jika tidak adanya ketersediaan sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain.

3. Strategi Bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk (merayu) agar sasaran perubahan (klien), mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Strategi bujukan dapat berhasil berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat. Berikut ini beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakan strategi bujukan, yaitu:
 - a. Strategi bujukan tepat digunakan bila sesuai sasaran perubahan.
 - b. Jika ada masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang fektif. Istilah lain: menyepelekan.
 - c. Pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien.
 - d. Ada anggapan dengan adanya perubahan dapat menimbulkan perpecahan.
 - e. Perubahan (inovasi) tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung.
 - f. Perubahan (inovasi) dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan.
4. Strategi Paksaan artinya dengan cara memaksa klien (sasaran perubahan) untuk mencapai tujuan perubahan (inovasi). Kekuatan memaksa seperti pemberian hadiah kepada klien yang berhasil, atau menghukum yang tidak mau dipaksa.

Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Strategi paksaan dapat diterapkan jika partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya.
- b. Strategi paksaan dapat diterapkan jika klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial.
- c. Strategi paksaan tidak dapat diterapkan jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksana perubahan juga tidak mampu mengadakannya.
- d. Strategi paksaan dapat diterapkan jika perubahan sosial yang diharapkan harus segera tercapai.
- e. Strategi paksaan dapat diterapkan jika klien sukar untuk mau menerima perubahan sosial.
- f. Strategi paksaan dapat diterapkan jika untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan.

E. Hambatan Inovasi

Adanya penolakan pada saat keputusan inovasi merupakan salah satu dari kendala atau hambatan yang dihadapi oleh sebuah inovasi yang akan diterapkan. Berikut ini terdapat 4 hambatan dalam proses inovasi secara umum menurut Kjell Skogen (1997: 3-11), meliputi:

1. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis merupakan jenis hambatan dikarenakan faktor ketidakpercayaan/tidak nyaman yang mengakibatkan penolakan sebuah inovasi. Faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap inovasi adalah: adanya rasa bersalah, butuh untuk diakui, adanya sistem

sosial yang bersifat kaku/tidak mau berubah, adanya pola perilaku yang kurang pertimbangan atau tidak pantas yang dipertahankan atau bahkan dikarenakan memang tidak tahu tentang permasalahan dari suatu inovasi tertentu.

2. Hambatan praktis

Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Hambatan praktis yang bersifat fisik meliputi waktu, sumber daya, dan sistem.

Yang *pertama*, faktor waktu. Mengimplementasikan inovasi, faktor waktu sering kurang diperhitungkan. Pada dasarnya, segala sesuatu memerlukan waktu. Waktu dalam hal ini seperti halnya membuat perencanaan inovasi. Waktu yang diperlukan untuk mengubah sesuatu juga tergantung pada seberapa baik informasi yang disebarkan, akses ke keahlian yang dibutuhkan, seberapa banyak penolakan yang muncul, dan seberapa banyak perubahan akan mempengaruhi rutinitas atau posisi individu dalam kelompok. Oleh karena itu, sangat bijaksana untuk merencanakan atau mempersiapkan diri sebagai inovator ataupun orang lain (termasuk mereka yang akan terkena dampak inovasi) untuk kenyataan bahwa segala sesuatu tidak akan berubah ke arah yang lebih baik secepat yang kita inginkan. Hal ini dikarenakan, sebagian besar fenomena menunjukkan bahwa upaya perubahan sering kali menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang kita harapkan.

Yang *kedua*, faktor sumber daya dan ekonomi. Yang dimaksud sumber daya yaitu sumber daya keahlian seperti pengetahuan dan keterampilan orang-orang yang dilibatkan dalam upaya inovasi. Sedangkan faktor ekonomi berupa kondisi keuangan yang dibutuhkan dalam inovasi. Pengalaman telah menunjukkan bahwa dana sangat dibutuhkan, khususnya pada awal dan selama masa penyebaran gagasan inovasi. Sebagai contoh sumber daya dan ekonomi yang bisa dimungkinkan untuk membantu penyebaran inovasi yaitu peralatan baru, realokasi dana, dan buku teks. Sumber

dana yang dialokasikan untuk perubahan sering kali tidak disediakan dari anggaran tahunan.

Yang *ketiga*, faktor sistem. Jenis hambatan ini dinyatakan bahwa inovasi tidak dapat berjalan sesuai harapan dikarenakan adanya struktur organisasi dalam suatu wilayah inovasi tertentu. Sistem inovasi yang sifatnya berjenjang dan mengharuskan melalui birokrasi tertentu, menjadikan inovasi untuk disebarakan maupun diadopsi akan mengalami kesulitan bahkan ketidakmampuan untuk dapat mengadopsi. Pada akhirnya kegagalan inovasi menjadi titik akhir inovasi yang hendak diterapkan.

3. Hambatan kekuasaan dan nilai

Kini kita memasuki jenis hambatan inovasi lainnya, yaitu hambatan kekuasaan dan nilai. Hambatan kekuasaan berbicara tentang posisi atau kedudukan dan wewenang seseorang dalam suatu institusi atau kelembagaan. Hambatan kekuasaan hampir memiliki arti yang sama dengan faktor sistem pada hambatan praktis. Akan tetapi yang membedakan pada hambatan kekuasaan ini mengacu pada hambatan yang bersifat fungsional yaitu berupa tugas dan fungsi pokok dari sebuah sistem. Sedangkan yang dimaksud sebuah sistem merupakan hambatan yang bersifat struktural yang pada dasarnya memiliki jenjang tertentu. Oleh karena itu, hambatan kekuasaan bersifat fungsional, sementara itu hambatan faktor sistem bersifat struktural. Selanjutnya, hambatan nilai melibatkan bahwa suatu inovasi selaras dengan nilai-nilai, norma-norma dan tradisi-tradisi yang dianut orang-orang tertentu dalam wilayah tertentu. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian peserta, maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi pun muncul.

F. Refleksi Inovasi Pendidikan di Indonesia.



INOVASI PENDIDIKAN DALAM SITUASI PANDEMI

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal, terutama pola hidup sehari-hari, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menyesuaikan diri. —Semua tahu, kita sedang dan akan menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi, bukan berarti kita tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi *uncertainty* inilah kemampuan adaptif sangat kita butuhkan. Kata Guru Besar UI dan *Founder* Rumah Perubahan Renald Khasali dalam tulisannya, —Virus Bermutasi, Manusia Beradaptasi. Renald menerangkan, tiap kali manusia berhadapan dengan kesulitan, maka inovasi muncul. "Dulu, banyak orang yang tak bisa mengonsumsi cokelat karena harganya yang sangat mahal. Pada 1963, Michele Ferrero dari Italia berinovasi mencampur cokelat yang mahal dengan gula, minyak, susu, dan kacang hazelnut. Lahirlah Nutella yang kemudian mendunia sebagai alternatif pengganti cokelat untuk dimakan bersama roti."

Saat ini, inovasi tentu sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Sebagaimana diketahui bersama, untuk mencegah penyebaran Covid-19, sekolah hingga universitas mengubah proses pembelajaran tetap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau *remote learning*. Di sinilah pentingnya orangtua, guru, dan murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajaran melalui penggunaan teknologi. —Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Cuitan Najwa Shihab pada 2015 itu tentu akan senantiasa relevan, terlebih dalam kondisi sekarang. Murid bisa belajar secara daring dengan pendampingan guru, sementara orangtua bisa membantu memonitor perkembangan belajar anak. Walau begitu, inovasi tak selalu berjalan mulus alias ada saja kendalanya mulai dari guru maupun orangtua yang gagap teknologi sampai dengan kesenjangan akses internet dan terbatasnya media belajar. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan inovasi dan memberikan bermacam perbaikan sistem pembelajaran, di antaranya, kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penayangan program Belajar dari Rumah yang disiarkan di TVRI bagi guru-murid dengan keterbatasan internet.

Covid-19 membuat semua orang harus keluar dari zona nyaman. "Satu-satunya cara untuk benar-benar belajar dan tumbuh sebagai individu, mau itu murid atau orang dewasa adalah untuk keluar dari zona nyaman kita. Di situ level pembelajaran paling optimal," ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Keluarnya semua orang dari zona nyaman masing-masing bakal melatih karakter adaptif, inovatif, dan kreatif komunitas pendidikan. Dalam ungkapan Renald, —Kemampuan beradaptasi itu akan muncul beriringan dengan daya inovasi. Sistem PJJ masih terus dikaji agar lebih fleksibel dan sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar—reformasi sistem pendidikan yang belum lama ini dicanangkan Kemendikbud. Konsep ini memberikan kemerdekaan bagi tiap unit pendidikan untuk berinovasi, salah satunya, ya melalui teknologi.

Nadiem pun berpesan kepada para guru, —Dalam krisis ini saatnya mencoba hal-hal yang dulu mungkin kita masih ragu, tapi di dalam hati kita merasa ini yang terbaik untuk para murid. Posisinya, situasi PJJ justru membawa hikmah karena ketika pandemi berakhir, salah satu hal yang menjadi kebiasaan baru masyarakat adalah kemampuan untuk bisa beraktivitas di mana saja. Orang-orang akan terbiasa dengan digitalisasi. —Potensi kita untuk bekerja dan menjadi efektif dari mana pun itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat baru buat kita, ujar Nadiem. Kombinasi pembelajaran tatap muka dan jarak jauh ini dinilai memiliki potensi luar biasa untuk memajukan pendidikan nasional. —Inilah saatnya guru dan orangtua berinovasi dengan melakukan banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya, terang Nadiem, karena secegang apa pun teknologi, sebesar apa pun inovasi pendidikan, peran guru sebagai pendidik tak akan tergantikan. —Konsepnya bukan untuk menggantikan guru, tetapi teknologi itu untuk memperkuat potensi guru.

Sumber: <https://tirto.id/inovasi-pendidikan-dalam-situasi-pandemi-fsgf>

G. Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

1. Berikan argument Anda tentang Inovasi pendidikan yang cocok/sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia selama masa pandemic saat ini ?
2. Mengapa diperlukan inovasi pendidikan ?
3. Jelaskan tahapan keputusan inovasi pendidikan jika tahapan tersebut hanya sampai pada tahap keputusan ? Berikan pula perbedaannya pada keputusan yang diterima dan keputusan yang ditolak !

BAB II

INOVASI KURIKULUM

Kompetensi Dasar :

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami makna inovasi kurikulum.
2. Mengidentifikasi Kurikulum Berbasis Kompetensi.
3. Mengidentifikasi Kurikulum Berbasis Sekolah.
4. Mengidentifikasi Kurikulum 2013.

Memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan telah diupayakan oleh pemerintah melalui penataan undang-undang sistem pendidikan nasional dan berbagai perundang-undangan lainnya. Upaya meningkatkan mutu lulusan salah satunya dengan adanya perubahan kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Yunani Kuno berasal dari kata *Curir* yang artinya pelari, dan *Curere* yang artinya tempat berpacu. *Curriculum* diartikan jarak

yang harus ditempuh oleh pelari. Dari makna yang terkandung, maka kurikulum dalam pendidikan dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk memperoleh ijazah. Sebuah kurikulum lembaga pendidikan terdapat dua tujuan yaitu: 1). Tujuan yang dicapai secara keseluruhan, yaitu tujuan yang meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diharapkan

dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang

besangkutan. 2). Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi, yaitu tujuan kurikuler adalah penjabaran institusional yang meliputi tujuan kurikulum dan intruksional yang terdapat dalam GBPP (Garis Besar Program Pengajaran) tiap bidang studi (June, 2007: 1-2).

Dalam konteks Kualifikasi Kerangka Eropa, "kompetensi berarti kemampuan terbukti menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pribadi, sosial dan/atau metodologis, dalam pekerjaan atau belajar situasi dan dalam pengembangan profesional dan pribadi". Menurut Definisi IEEE Reusable Kompetensi (RCD), sebuah "kompetensi didefinisikan sebagai segala bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan atau tujuan pendidikan yang dapat dijelaskan dalam konteks pembelajaran, pendidikan atau pelatihan" (Nikolov, Shoikova, dan Kovatcheva, 2014: 4).

Konsep kurikulum yang tercantum dalam Kepmendiknas No 232/U/2000 dan No 045/U/2002 berbeda latar belakangnya, seperti: (a) persaingan di dunia global, yang berakibat juga terhadap persaingan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam dunia global. (b) adanya perubahan orientasi pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu tetapi juga yang mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakatnya (kompeten dan relevan), yang lebih berbudaya. dan (c) Juga adanya perubahan kebutuhan di dunia kerja yang terwujud dalam perubahan persyaratan dalam menerima tenaga kerja, yaitu adanya persyaratan *softskills* yang dominan disamping *hardskills*-nya. Sehingga kurikulum yang dikonsepsikan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai/dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/*stakeholders*.

Selama ini kebijakan pengembang pendidikan dilakukan secara terpusat (*sentralistik*), di mana semua kebijakan mulai dari kurikulum sampai pedoman pelaksanaan teknis ditangani oleh pusat. Maka, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah dan kewenangan daerah (Depdiknas, 2003: 8).

UU No. 22 tahun 1999 dan pp No. 25 tahun 2000 berimplikasi terhadap kebijaksanaan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Perubahan pengelolaan tersebut merupakan upaya pemberdayaan daerah dan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh. Wujud dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam bidang kurikulum yaitu pembuatan silabus yang dibuat oleh daerah dan sekolah (Depdiknas, 2003: 8-9)

Disamping itu perubahan kurikulum didorong adanya perubahan otonomi suatu institusi atau lembaga pendidikan yang dijamin dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulumnya sendiri. Jadi sangat dimungkinkan perubahan kurikulum disebabkan juga oleh adanya perubahan rencana strategis institusi atau lembaga pendidikan yang termuat dalam visi dan misinya (Dirjen Pendidikan Tinggi, 2008: 6-7).

Perubahan kurikulum yang dilatarbelakangi banyak faktor di atas, pada dasarnya sebelum kurikulum diterapkan terdapat 4 tahapan. Adapun 4 tahapan dalam inovasi kurikulum menurut Mark Brundrett dan Diane (2010: 54) antara lain:

1. Tahap Meneliti: termasuk mengamati kondisi lingkungan untuk membangun pengetahuan yang terperinci dari sekolah, orang tua nya, masyarakat, sejarah dan konteks sosial dengan

mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan dan kepentingan murid serta kekuatan dan keahlian dari para stafnya.

2. Tahap Membangun Etos Kerja: termasuk menciptakan etos kerja untuk perubahan yang memungkinkan kebebasan untuk eksperimen, didukung pengambilan risiko dan uji coba dan uji coba inovasi kurikulum.
3. Tahap Uji Coba: termasuk kesempatan untuk percobaan dan review perencanaan dan merekam format dipandang sebagai pusat proses perubahan.
4. Tahap Pelaksanaan: termasuk garis waktu yang jelas dan dipahami untuk implementasi yang dibuat eksplisit dalam kurikulum yang sudah direncanakan. Selanjutnya perencanaan kurikulum tersebut, melalui dalam langkah dan tahapan antara gagasan pembaruan awal yang implementasi akhirnya dikomunikasikan kepada semua orang yang bersangkutan.

Perubahan kurikulum memberikan dampak besar bagi proses pembelajaran yang berlangsung. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum beberapa kali, yaitu pada tahun 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, dan sampai pada kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi (Depdiknas, 2003: 11).

Berikut ini perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia yang selalu berinovasi dalam mengembangkan mutu lulusan.

Tabel 2.1. Perkembangan Kurikulum Di Indonesia

No	Tahun	Fokus Orientasi
1	1968	<i>Subject Matter</i> (mata pelajaran).
2	1975	<i>Terminal Objectives</i> (TIU, TIK).
3	1984	Keterampilan Proses (CBSA).
4	1994	Munculnya pembagian antara kurikulum nasional dengan kurikulum muatan lokal.
5	2004	Kurikulum Berbasis Kompetensi = KBK.
6	2006	Kurikulum berbasis lokal (daerah/satuan pendidikan) = KTSP.

Sumber: Carla Rindi Lestari

(<https://www.scribd.com/doc/274282911/pertemuan3ktsp>)

Sementara itu dalam perkembangan kurikulum di Indonesia terwujud dalam beberapa basis kurikulum, antara lain:

A. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam kurikulum di Indonesia diistilahkan dengan KBK. Arti KBK sebagai suatu konsep kurikulum pada perkembangan kemampuan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar kompetensi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tersebut (E.Mulyasa, 2002: 9). Pusat kurikulum, Balitbang Depdiknas (2002) mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. kurikulum ini berorientasi pada : (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri siswa melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan (2)

Keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh sebab itu, kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang pada tahap perencanaan, terutama dalam tahap pengembangan ide akan dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan pendekatan, kompetensi dapat menjawab tantangan yang muncul.

Kompetensi yang muncul menurut Amstrong (I Wayan Santyasa, 2003: 93-94) mendefinisikan kompeten (*competence*) dan kompetensi (*competency*) secara berbeda. Kompeten menyatakan apa yang dibutuhkan oleh individu untuk melakukan pekerjaan dengan baik, sedangkan kompetensi menyatakan bagaimana melakukan pekerjaan. Kompeten menekankan pada hasil dan fokus pada *output*, sedangkan kompetensi menekankan pada upaya dan fokus pada *input* dan *process*. Kompetensi mengacu pada dimensi perilaku yang mendukung kinerja. Amstrong membagi kompetensi menjadi tiga jenjang (1) Kompetensi inti, yaitu kompetensi yang diterapkan dalam pembelajaran secara keseluruhan. Kompetensi ini memiliki empat perspektif, (a) perspektif eksternal, bagaimana siswa memandang guru, (b) perspektif internal, apa yang harus diunggulkan, (c) perspektif belajar dan inovasi, berorientasi pada pembaharuan, dan (d) perspektif pengguna, bagaimana guru memandang siswa. (2) kompetensi generik, yaitu kompetensi yang memiliki nilai keberlanjutan, dan (3) kompetensi spesifik, yaitu kompetensi yang unik untuk fungsi dan aktivitas tertentu.

KBK merupakan program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya merancang pendidikan yang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan terkait dengan —gerakan peningkatan mutu pendidikan‖ yang dicanangkan oleh mendiknas tanggal 21 Mei 2002. Dalam KBK terdapat asumsi yang mendasari KBK, adapun asumsi tersebut merupakan parameter untuk menentukan tujuan dan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Asumsi tersebut sebagai berikut :

1. Banyak sekolah yang memiliki sedikit guru profesional dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu perlu peningkatan profesional guru.
2. Banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman, sehingga mengajar diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi yang terdapat dalam setiap mata pelajaran.
3. Pendidik bukanlah kertas putih bersih yang dapat ditukis sekehendak guru, tapi memiliki potensi yang perlu dikembangkan.
4. Pengembangan potensi tersebut menurut iklim kondusif yang dapat mendorong siswa belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*),serta menghubungkan kemampuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Siswa memiliki potensi yang berbeda dan bervariasi, serta memiliki tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Pendidikan berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membantu siswa mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal.
6. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus berisi kompetensi-kompetensi potensial yang tersusun secara sistematis, sebagai jabaran dari seluruh aspek kepribadian siswa, yang mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan.
7. Kurikulum sebagai proses pembelajaran harus menyediakan berbagai kemungkinan kepada seluruh siswa untuk mengembangkan berbagai potensinya secara optimal (E.Mulyasa, 2002: 52).

Beberapa aspek atau ranah yang mengandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan

identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap siswa sesuai dengan kebutuhannya.

2. Pemahaman (*understanding*) yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu., misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi siswa, agar melaksanakan pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada siswa.
4. Nilai (*value*) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain)
5. Minat (*interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk melakukan sesuatu atau untuk mempelajari sesuatu.
6. Sikap (*attitude*) yaitu perasaan (senang, tak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan lain-lain (E.Mulyasa, 2002: 23-29).

Adapun dasar pemikiran konsep dasar kompetensi dalam kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi berkenaan dengan seperangkat kemampuan melakukan sesuatu konteks tertentu.
2. Konteks yang dimaksudkan disini sendiri atas berbagai bidang kehidupan atau hal-hal lainnya yang diperlukan agar seseorang dapat melakukan sesuatu.
3. Kompetensi itu mendiskripsikan proses belajar, seseorang untuk menjadi kompeten.

4. Kompeten adalah suatu hasil atau out come yang menggambarkan apa yang dapat di perbuat seseorang setelah melalui pemahaman seperangkat kompetensi.
5. Kemampuan seseorang melakukan sesuatu harus di defisinikan secara jelas dalam suatu standar yang tepat dicapai melalui *performance* yang dapat diukur.
6. Kompeten menjadi suatu ukuran dari apa yang dapat diperbuat oleh seseorang berdasarkan penggantian kompetensi, batas, kurikulum berdasarkan potensi.

Mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik.
2. Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Lebih lanjut E.Mulyasa mengemukakan terdapat enam karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi (E.Mulyasa, 2006: 42-55) yaitu : Yang *pertama*, sistem belajar dengan modul. Sistem belajar modul adalah suatu paket kurikulum yang disediakan untuk belajar sendiri dengan pengajaran yang sebagian atau seluruhnya didasarkan atas modul, misalnya seorang guru dalam mengajar menggunakan metode tradisional seperti ceramah dengan berpedoman dari modul tersebut. System belajar dengan modul Berbagai komponen tersebut selanjutnya Diknas dalam format modul sebagai berikut:

- a) Lembar kegiatan siswa.
- b) Lembar kerja.

- c) Kunci lembar kerja.
- d) Lembar soal.
- e) Lembar jawaban.
- f) Kunci jawaban.

Yang *kedua*, menggunakan keseluruhan sumber belajar artinya seorang guru menggunakan sumber belajar secara maksimal sangat dibutuhkan agar dalam proses belajar mengajar tidak pasif dan kurang kreatif menyenangkan sehingga keaktifan siswa lebih diutamakan. Selain itu untuk melengkapi, memelihara, dan memperkaya khazanah belajar, sumber belajar juga meningkatkan aktivitas dan kreatifitas siswa, yang sangat menguntungkan baik bagi guru maupun siswa. Sumber belajar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Manusia (*Human*).
- b) Bahan atau media pengajaran (*Instructional media*).
- c) Lingkungan (*Environment*).
- d) Alat dan peralatan (*Product*).
- e) Aktivitas.

Yang *ketiga*, pengalaman lapangan. KBK lebih menekankan pada pengalaman lapangan yang dapat melibatkan masyarakat secara sistematis dalam pengembangan program, kreatifitas dan evaluasi pembelajaran. Keterlibatan ini sangat penting karena masyarakat adalah pemakai dari produk pendidikan. Selain itu pengalaman lapangan ini dapat mengakrabkan antara guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan adanya keakraban tersebut akan menambah kekuatan dan minat siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dan terlindunginya guru terhadap rasa tidak senang siswa.

Yang *keempat*, strategi belajar individual personal adalah belajar berdasarkan tempo belajar siswa. Sedangkan belajar personal adalah interaksi edukatif berdasarkan keunikan siswa (bakat, minat, dan kemampuan). Dalam strategi ini tidak hanya sekedar individualisasi dalam pembelajaran untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan kognitif siswa, tetapi mencakup respon-respon terhadap perasaan pribadi dan kebutuhan pertumbuhan psiko-sosial siswa.

Yang *kelima*, kemudahan belajar yaitu pemberian kombinasi antara pembelajaran individual dengan pengalaman pembelajaran dan pembelajaran secara tim. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai media komunikasi yang dapat didayagunakan secara optimal untuk memberikan kemudahan dalam belajar untuk mencapai atau menguasai kompetensi tertentu.

Yang *keenam*, Belajar Tuntas (*mastery learning*) yaitu strategi belajar dimana seluruh materi pelajaran dikuasainya oleh siswa (penguasaan secara penuh), kembali pada tujuan akhir guru mengajar adalah agar seluruh bahan yang disampaikan dikuasai sepenuhnya oleh siswa, bukan hanya oleh sebagian orang saja yang diberikan angka tertinggi. Dari sini jelas bahwa belajar tuntas harus diterapkan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Tiga landasan teoritis yang mendasari penerapan KBK. *Pertama*, adanya pergeseran dari pembelajaran klasikal ke arah pembelajaran individual. Dalam pembelajaran ini siswa dapat belajar sendiri sesuai dengan cara dan kemampuannya masing-masing dan tidak tergantung dari orang lain. *Kedua*, pengembangan konsep belajar tuntas (*mastery learning*) yang menyatakan bahwa dengan sistem belajar yang tepat, semua siswa dapat mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil baik. *Ketiga*, pendefinisian kembali terhadap bakat, karena setiap siswa dapat mencapai tujuan secara optimal, jika diberikan waktu yang cukup (Wagiran, 2005: 426).

Implikasi dari ketiga landasan teoritis tersebut adalah: *Pertama*, pembelajaran perlu lebih menekankan kepada kegiatan individual dan perlu memperhatikan perbedaan siswa. *Kedua*, perlu diupayakan lingkungan belajar yang kondusif dengan metode dan media yang bervariasi dan memungkinkan setiap siswa belajar dengan tenang dan menyenangkan. *Ketiga*, dalam pembelajaran

perlu diberikan waktu yang cukup terutama dalam penyelesaian tugas atau praktek, agar siswa dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik (Wagiran, 2005: 426).

Implementasi kurikulum sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

1. Karakteristik kurikulum: yang mencakup ruang lingkungan ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan.
2. Strategi implementasi: yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.
3. Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan (*curriculum planning*) dalam pembelajaran E.Mulyasa, 2002: 53).

Implementasi pengertian ini menyebabkan rumusan kompetensi dalam KBK itu mengambil dua bentuk, sebagai berikut: (1) Standar Kompetensi yaitu merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus ditunjukkan oleh siswa pada hasil belajarnya. Standar kompetensi untuk mata pelajaran matematika, misalnya "menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, memahami dan melakukan operasi aljabar, fungsi, persamaan garis dan sistem persamaan serta menggunakan dalam pemecahan masalah". (2) Kompetensi Dasar merupakan kompetensi minimal yang dapat dikembangkan oleh sekolah. Contoh kompetensi dasar adalah "menyelesaikan operasi bilangan bulat dan mengenal sifat operasi bilangan bulat", dengan standar kompetensi "melakukan operasi hitung bilangan bulat serta dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah" (Depdiknas 2003: 4-7).

B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP pasal 1 ayat 15) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Artinya bahwa dalam penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Maka, KTSP merupakan pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Satuan pendidikan tersebut merupakan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari para pejabat daerah setempat komisi pendidikan paan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga pendidikan, perwakilan orang tua siswa, dan tokoh masyarakat. Institusi tersebut yang menetapkan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang berlaku. Selanjutnya komite sekolah perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah.

Menurut Masnur Muslich (2007: 12) rumusan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan mengacu pada tujuan umum pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Penyusunan kegiatan operasional dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) meliputi 3 aspek, yang *pertama* KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan siswa. Yang *kedua*, sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggungjawab dibidang pendidikan. Yang *ketiga*, kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Selain itu, KTSP perlu diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dikarenakan berkaitan dengan tujuh hal sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat menoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
4. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien dan efektif bila dikontrol oleh masyarakat sekitar.

5. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya memaksimalkan untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP.
6. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
7. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkunganyangberubahdengancepat,serta mengakomodasikannya dalam KTSP (Endang Widuri, 2008: 9).

Sementara itu, secara khusus menurut Dirjen Pendidikan Nasional (2008: 23-24) KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.

- 1) Berpusat pada Potensi, Perkembangan, Kebutuhan, dan Kepentingan Siswa dan Lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan bahwa siswa memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi siswa disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta tuntutan lingkungan. Sehingga dalam pembelajaran siswa sebagai posisi sentral pembelajaran di kelas.

- 2) Beragam dan Terpadu

Kurikulum dikembangkan melalui keanekaragaman karakteristik siswa, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, latar belakang sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib

kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3) Tanggap terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar siswa untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4) Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja.

5) Menyeluruh dan Berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan se-cara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

6) Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencer-minkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan in-formal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7) Seimbang antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan

memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Implementasi kurikulum setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- 1) Karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan.
- 2) Strategi implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, loka karya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum dilapangan.
- 3) Karakteristik pengguna kurikulum meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran (E. Mulyasa, 2009: 179-180).

Selanjutnya E. Mulyasa menambahkan bahwa implementasi KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada siswa untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Tugas guru dalam implementasi KTSP adalah bagaimana memberikan kemudahan belajar kepada siswa, agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternal sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang dikemukakan dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Pada dasarnya dalam pengembangan KTSP dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut:

- a) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan siswa.
- b) Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan

kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

- c) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (E. Mulyasa, 2003: 20).

Merujuk dari pengembangan KTSP di atas, bahwasanya sekolah atau instansi pendidikan diberikan kewenangan secara otonomi bagi penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan mutu lulusan. Dalam hal ini kebebasan penyelenggaraan diartikan dalam memberikan manajemen kepada institusi pendidikan tertentu untuk menginovasikan mutu pendidikannya. Salah satu istilah penyelenggaraan otonomi sekolah adalah manajemen berbasis sekolah. Menurut Nurkholis (2003:1) bahwa Manajemen Berbasis Sekolah terdiri dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. **Pertama**, istilah manajemen memiliki banyak arti. Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Ditinjau dari aspek pendidikan, manajemen pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun tujuan jangka panjang. **Kedua**, kata *berbasis* mempunyai kata dasar basis atau dasar. **Ketiga**, kata sekolah merujuk pada lembaga tempat berlangsungnya proses belajar mengajar.

Bertolak dari arti ketiga istilah itu, maka istilah Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya yang berdasar pada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pula dalam opini Dirjen Pendidikan Agama Islam (2002: 2) bahwa Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sementara itu, Slamet menyatakan argumen bahwa MBS adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonom (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif). Kelompok kepentingan tersebut meliputi kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, tenaga administratif, orangtua siswa, tokoh masyarakat, para profesional, wakil pemerintahan, wakil organisasi pendidikan (Slamet, 2003: 7).

Menurut Atelia M, Amy C dan Martin (2007: iii) istilah MBS juga dimaknai sebagai belajar berbasis masyarakat, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa untuk sukses dan kewarganegaraan sehingga diperlukan upaya bersama dan disengaja untuk melibatkan semua siswa dalam belajar. Banyak pendekatan untuk pembelajaran berbasis masyarakat sudah digunakan; makalah ini menyoroti enam model dengan penekanan khusus pada pemecahan masalah masyarakat: layanan berbasis akademis masyarakat, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan berbasis lingkungan, berbasis tempat belajar, belajar layanan, dan pembelajaran berbasis kerja. Jika semua siswa untuk berhasil, kita harus membayar lebih banyak perhatian untuk belajar berbasis masyarakat sebagai strategi untuk menarik dan memotivasi siswa dan untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Oleh sebab itu, MBS diharapkan setidaknya dapat diperoleh beberapa keuntungan antara lain, yaitu:

- a) Mendorong kreativitas kepala sekolah untuk mengelola sekolahnya menjadi lebih baik.
- b) Dapat lebih mengaktifkan atau meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap kinerja dan keberhasilan sekolah atau madrasah.
- c) Dapat mengembangkan tugas pengelolaan sekolah atau madrasah tersebut menjadi tanggung jawab sekolah dan masyarakat.
- d) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah atau madrasah dalam mengelola dan membedayakan sumber daya yang tersedia.
- e) Meningkatkan kepedulian warga sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- f) Meningkatkan tanggung jawab sekolah atau madrasah kepada orang tua, pemerintah tentang mutu sekolah atau madrasah.
- g) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar madrasah dan sekolah lain untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan (Dirjen Pendidikan Agama Islam, 2002: 2-3).

C. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 (KTSP) yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif (Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014: 2-3). Berikut tabel 2.1 tentang perubahan pola pikir kurikulum 2013.

Tabel 2. 1 Pola Pikir Kurikulum

No	KBK (2004) dan KTSP (2006)	Kurikulum 2013
1	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan
2	Standar Isi dirumuskan berdasarkan Tujuan Mata Pelajaran (Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran) yang dirinci menjadi SK dan KD mata pelajaran	Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata Pelajaran
3	Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk Pengetahuan	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan,
4	Kompetensi diturunkan dari mata Pelajaran	Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas)
5	Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain.	

Kurikulum 2013 mempunyai empat kompetensi inti (KI) yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi inti berdasarkan Permendikbud No. 57 Tahun 2014 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia, 2014: 3) meliputi:

- (1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual.

- (2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial.
- (3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan.
- (4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Kurikulum 2013 mencanangkan adanya pendekatan saintifik yang memungkinkan peserta didik belajar secara lebih efektif serta bermakna. Pendekatan saintifik/ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas fenomena atau gejala, memperoleh

pengetahuan baru, atau dapat pula disebut mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Perpaduan tersebut dalam bentuk kolaborasi teori dan kenyataan. Pelaksanaannya pemberian masalah berupa kasus-kasus tertentu kemudian diinvestigasi sehingga mendapat informasi baru untuk saling mengoreksi (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016: 12-13).

Pendekatan saintifik kurikulum 2013 menampilkan ciri-ciri dari proses pembelajaran konstruktivisme yaitu 1) proses untuk mengubah gagasan/ide siswa; 2) siswa menjadi mandiri dalam konstruksi pengetahuan; 3) proses belajar menjadi bermakna (*meaning*) karena mengkonstruksi hubungan antara pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar dan pengetahuan yang sedang dipelajari, proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus dan aktif; dan 4) proses belajar untuk menerima pengetahuan yang sedang dipelajari, sehingga siswa bertanggung jawab tentang belajarnya (Waseso, 2018: 62).

Pendekatan saintifik dalam pandangan Nurdyansyah & Musfiqon (2015: 11-14) bahwa pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip. Pembelajaran meliputi mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan meng-komunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang —ditemukan

Pendekatan saintifik/ilmiah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa guru dengan menggunakan pembelajaran tradisional sebesar 10% setelah 15 menit dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 25%, pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90% setelah dua hari dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 50-70% (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016: 55).

Penjabaran di atas dapat ditarik simpulan bahwa pendekatan saintifik/ ilmiah adalah suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah sehingga mampu mengkonstruksi pada pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Pendekatan saintifik menjadikan proses pembelajaran agar siswa aktif dalam pemahaman dan membangun materi melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang —ditemukan

Penerapan pendekatan saintifik dalam implementasi Kurikulum 2013, selain dapat membantu menciptakan pembelajaran yang memenuhi standar proses sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, juga dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran dan pendidikan yang utuh, meliputi: sikap (sikap religius dan sikap sosial), pengetahuan, dan keterampilan (Susilana & Ihsan, 2014: 35).

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan (Nurdyansyah & Musfiqon, 2015: 67-72). Hal tersebut sejalan dengan pemikiran (Atmarizon & Zaim, 2016: 11-14; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016: 9-13; Nurdyansyah & Musfiqon, 2015: 67-72; Rahmatik, 2017: 30-32) bahwa pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar/mengasosiasi, mengeksplorasi dan mengkomunikasikan (5M). Pendekatan ini merujuk kepada teknik-teknik investigasi atas suatu fenomena, cara memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan dengan pengetahuan sebelumnya.

(1) Mengamati

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Keunggulan metode mengamati adalah peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya.

(2) Menanya

Menanya menurut Kemendikbud mempunyai fungsi sebagai berikut.

- (a) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik.
- (b) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.
- (c) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan anjakan untuk mencari solusinya.
- (d) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan.
- (e) Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban

secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

- (f) Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumentasi, mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan.
- (g) Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok.
- (h) Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul.
- (i) Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain.

(3) Menalar/Mengasosiasi

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.

(4) Mengeksplorasi

Aplikasi mengeksplorasi dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

(5) Membentuk jejaring/Mengkomunikasikan

Situasi jejaring/kolaboratif peserta didik akan dilatih berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing.

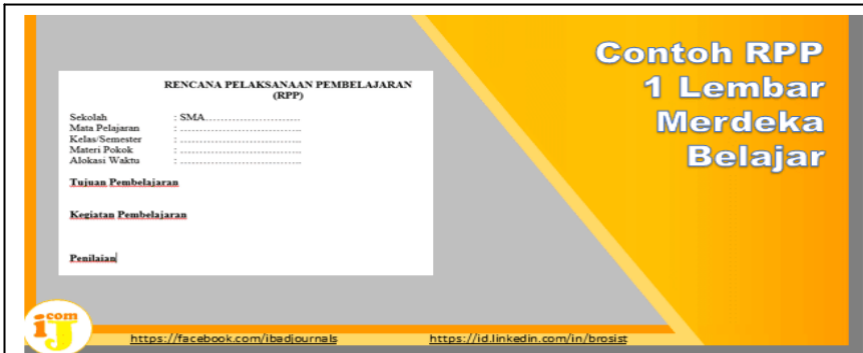
Penelitian ini mengembangkan model *Problem Based Learning* melalui langkah pembelajaran tematik dalam bentuk pendekatan saintifik yang terdiri dari 5 tahapan yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Menurut Beringer (2007: 446-447); Silver (2014: 250-251) ada beberapa pendekatan pembelajaran berbasis ilmiah/saintifik, yaitu:

- a) Penerapan pendekatan sistem dan langkah-langkah pemecahan masalah (*Problem Based Learning*).
- b) Pendekatan sistem, pendekatan pemecahan masalah, dan perencanaan secara sistematis.
- c) Pembelajaran berbasis riset (*Research based-teaching*).
- d) Strategi inkuiri (*Inquiry*).

Keempat cabang pendekatan saintifik di atas, yang akan dikembangkan yaitu model pembelajaran *Problem Based Learning*. *Problem Based Learning* dalam pengembangan model sebagai strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk terlibat aktif berpikir dalam proses pembelajaran. Siswa berperan sebagai subjek pembelajaran, yaitu secara aktif menemukan dan memahami materi yang tertera pada kurikulum 2013.

D. Refleksi Inovasi Kurikulum di Indonesia



RPP SATU LEMBAR DALAM MERDEKA BELAJAR

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019 merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, ia menyebutkan penyederhanaan RPP ini didedikasikan untuk para guru agar meringankan beban administrasi guru, ia juga menambahkan selanjutnya Kemendikbud akan memberikan beberapa contoh RPP singkat yang cukup dikerjakan dalam satu halaman. Menanggapi kebijakan baru tersebut, kami mengapresiasi Kebijakan Pokok Pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama ini beban administrasi yang ditimbulkan dari penyusunan RPP sering dikeluhkan para guru. Seperti diberitakan sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim akan menyederhanakan RPP menjadi cukup satu lembar saja, namun mencakup unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pembelajaran.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Belasan komponen RPP ini disederhanakan menjadi tiga komponen inti yang dapat dibuat dalam satu halaman, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Sisa komponen lainnya hanya sebagai pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan. Menurut Nadiem, hal itu bisa menjadi fokus membangun pendidikan karakter siswa. Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah ada, guru harus mengisi dengan sedikitnya 13 komponen dalam RPP, namun kini komponen panjang tersebut hanya menjadi tiga komponen utama. Tiga komponen utama itu dimuat dalam satu lembar jauh lebih sedikit dibandingkan belasan lembar yang selama ini harus diisi. RPP yang ada selama ini hanya membebani guru. Berbagai format RPP mulai sejak kurikulum diterapkan sampai kurtilas revisi sudah mengalami berbagai perubahan konsep. Istilahnya juga mengalami berbagai perubahan. Tujuannya tetap sama yaitu perencanaan pembelajaran sebelum masuk kelas. Konsep RPP dengan format yang sudah ada selama ini dianggap bersifat kaku. Selain itu format yang ada terlalu banyak dengan adanya 13 komponen dalam satu RPP. Kemudian guru menyusun sendiri RPP per Kompetensi Dasar (KD) sesuai bidang studi yang diampunya. Misalnya jika seorang guru matematika mengajar di kelas VI dengan total ada 8 Kompetensi Dasar. Setiap Kompetensi Dasar harus dibuat dengan 13 komponen lengkap dalam satu RPP, maka setiap RPP per Kompetensi Dasar jumlah halamannya bisa lebih dari 20 lembar. Dengan kasus seperti contoh tersebut, maka akan menghabiskan waktu guru yang sangat banyak. Apalagi ketika adanya perubahan kurikulum dengan adanya penambahan materi sehingga harus dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Saat itu juga suatu keharusan maka dengan berbagai cara harus dibuat. Padahal tugas guru bukan hanya melakukan perencanaan pembelajaran saja melainkan harus melakukan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

Hal yang penting dalam sebuah RPP bukan tentang penulisannya, melainkan tentang proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi, dengan RPP itu sendiri guru dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran di kelas. Selain dapat memperbaiki kinerjanya di kemudian hari, penyusunan RPP secara efisien dan efektif dilakukan agar guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. RPP bukan hanya sekedar administrasi yang perlu dilakukan guru dengan mengisi puluhan halaman. Namun refleksi yang dimaksud adalah apakah hal yang ingin disampaikan sudah dengan baik tersampaikan kepada peserta didik atau belum. Pada hakekatnya penulisan RPP dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas SDM anak-anak negeri. Sumber: <https://bdksemarang.kemendag.go.id/berita/rpp-satu-lembar-dalam-merdeka-belajar>

E. Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

1. Bagaimana pendapat Anda kurikulum di Indonesia menerapkan merdeka belajar ?
2. Kurikulum yang identik dengan kebebasan untuk mengembangkan potensi kelas/ sekolah masing-masing adalah kurikulum KBK/KTSP ? Berikan alasan Anda !
3. Buatlah RPP dengan *scientific approach* yang meliputi: mengamati, menanya, menalar/mengasosiasi, mengeksplorasi dan mengkomunikasikan (5M).

BAB III

INOVASI PEMBELAJARAN

Kompetensi Dasar : Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami makna inovasi pembelajaran.
2. Mengidentifikasi pembelajaran berbasis kompetensi.
3. Mengidentifikasi pembelajaran berbasis sekolah.
4. Mengidentifikasi pembelajaran berbasis keterpaduan.
5. Mengidentifikasi pembelajaran Quantum.
6. Mengidentifikasi pembelajaran berbasis TIK.
7. Menyebutkan fenomena inovasi pembelajaran di Indonesia.

Seperti halnya dalam kurikulum, pada pembelajaran yang ada di Indonesia juga mengalami perubahan (inovasi) dari tahun ke tahun. Berikut ini matrik penjabaran inovasi pembelajaran di Indonesia berdasarkan konsep tradisional, progresif dan modern.

Tabel. 3.1. Perkembangan Pembelajaran

No	Aspek	Tradisional	Progresif	Modern
1.	Tujuan	Transfer	Perkembangan Pribadi	Penerapan
2.	Pendekatan	Unsur-unsur	Keutuhan, bakat, minat	Daerah kehidupan
3.	Materi	<i>Text Book</i>	Keinginan Siswa	Masyarakat
4.	Metoda	<i>Formal Step, Asosiasi</i>	<i>Discovery, Problem Solving, independent study</i>	Karyawisata, kemah, <i>survey</i> , pembelajaran proyek
5.	Guru	Berkuasa	Tidak Berkuasa, siswa aktif	Siswa aktif dengan bimbingan guru
6.	Evaluasi	Dikembangkan guru berdasarkan pengetahuan	<i>Self evaluation</i>	Oleh siswa, guru dan masyarakat

Sumber: Carla Rindi Lestari

(<https://www.scribd.com/doc/274282911/pertemuan3ktsp>)

Perbandingan ketiga konsep di atas merupakan salah satu titik pijak pembelajaran yang kian berinovasi. Karena pada dasarnya, konsep kegiatan belajar mengajar merupakan wujud dari interaksi antara guru dengan siswa dalam prosedur intruksional (Hasibuan dan Moedjiono, 1986: 3). Kegiatan belajar mengajar diartikan sebagai hubungan interaktif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa (Roestiyah, 2008: 44). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan pola umum hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa yang didukung oleh semua komponen belajar mengajar, untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Hasil yang diharapkan bisa memiliki dampak pengajaran dan dampak pengiring secara berkesinambungan di sepanjang hayat, termasuk

di dalamnya siswa dapat berpikir kritis, kreatif, aktif, sopan, dan terampil (Subiyat, 2006: 183-185).

Dampak pengajaran dan dampak pengiring sangat diharapkan demi keterlaksananya pendidikan yang kreatif dan inovatif salahsatunya melalui inovasi dalam pembelajaran di kelas. Berikut ini inovasi pembelajaran di Indonesia antara lain:

A. Pembelajaran Berbasis Kompetensi

Pembelajaran Berbasis Kompetensi merupakan suatu model pembelajaran dimana perencanaan, pelaksanaan, dan penilaiannya mengacu pada penguasaan kompetensi. Pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi dimaksudkan agar segala upaya yang dilakukan dalam pembelajaran benar-benar mengacu dan mengarahkan siswa untuk menguasai kompetensi yang ditetapkan sehingga mereka tuntas dalam belajarnya (Depdiknas, 2002).

Sementara itu, dalam pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar dipilih setelah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar ditentukan. Berikut ini langkah-langkah pengembangan pembelajaran KBK antara lain:

1. Menentukan identitas matapelajaran.
2. Menentukan standar kompetensi.
3. Kompetensi dasar.
4. Materi pembelajaran.
5. Strategi pembelajaran/pengalaman belajar.
6. Indikator pencapaian.

Konsep pembelajaran berbasis kompetensi berfokus pada apa yang dapat dilakukan mahasiswa (kompetensi) sebagai kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa. Pembelajaran berbasis kompetensi menempatkan mahasiswa sebagai subyek belajar yang aktif merencanakan pembelajarannya, menggali dan menginterpretasikan materi pembelajaran yang diperlukan.

Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki keunggulan dibandingkan pembelajaran konvensional. Keunggulan pembelajaran berbasis kompetensi menurut Putu Sudira dapat dijabarkan dalam matrik berikut (core.ac.uk/download/pdf/11059150.pdf):

Tabel 3.2. Pembelajaran Kompetensi dan Konvensional

No	Aspek	Diklat Berbasis Kompetensi	Diktat Konvensional
1	Apa yang dipelajari Mahasiswa	<p>a. Didasarkan kompetensi atau tugas-tugas yang relevan dengan DU-DI.</p> <p>b. Kompetensi tersebut dideskripsikan secara jelas apa yang harus dikerjakan, indikator ketercapaian kompetensi, dan seluruhnya harus dicapai dan dikuasai secara lengkap dan tuntas oleh mahasiswa.</p>	<p>a. Didasarkan pada disiplin ilmu atau mata pelajaran (<i>Subject Matter</i>).</p> <p>b. Mahasiswa jarang sekali mengetahui dengan jelas apa yang akan dipelajari pada setiap program pembelajaran. Program pembelajaran disusun sesuai bab, pokok bahasan kurang dimaknai artinya dalam bidang pekerjaan.</p>
2	Bagaimana mahasiswa belajar.	Mahasiswa disediakan bahan ajar (modul) yang didesain untuk membantu mereka agar dapat menyelesaikan setiap tugasnya. Bahan-bahan itu diorganisir sedemikian rupa agar setiap mahasiswa dapat memperlambat,	Umumnya mahasiswa mendengarkan dosen mengajar di depan kelas, memperhatikan dosen mendemonstrasikan, diskusi dan beberapa pembelajaran terfokus pada dosen. Mahasiswa hanya mempunyai sedikit kontrol terhadap pembelajaran yang mereka

		mempercepat, berhenti atau mengulang kembali apabila diperlukan. Pada setiap bagian dilengkapi dengan umpan balik secara periodik, untuk memberi kesempatan mahasiswa melakukan koreksi terhadap kemampuan unjuk kerja yang sedang berlangsung.	lakukan. Biasanya sangat jarang umpan balik pengembangan yang diberikan untuk mahasiswa.
3	Kapan Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan satu tugas, dan boleh melanjutkan ke tugas berikutnya.	<p>a. Setiap mahasiswa disediakan cukup waktu untuk menyelesaikan satu tugas, sebelum berpindah pada tugas berikutnya.</p> <p>b. Setiap mahasiswa dituntut melakukan unjuk kerja setiap tugas sampai pada pada tahap penguasaan.</p> <p>c. Penilaian hasil belajar berdasarkan pencapaian standar kompetensi tertentu (penilaian acuan patokan)</p>	<p>a. Biasanya sekelompok mahasiswa disediakan waktu yang sama untuk menyelesaikan setiap unit pembelajaran. Sekelompok mahasiswa kemudian berpindah pada unit pembelajaran berikutnya, meskipun waktu yang ditetapkan terlalu singkat atau terlalu lama.</p> <p>b. Mahasiswa mengerjakan tugas ujian tertulis dan hasilnya dibandingkan dengan nilai perolehan kelompok/kelas (Penilaian acuan norma).</p> <p>c. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan ke unit pembelajaran</p>

			beriktunya, meskipun nilai perolehannya marjinal bahkan gagal.
--	--	--	--

Prinsip operasional pembelajaran dalam penerapan KBK antara lain: **Pertama**, siswa harus dilibatkan dan diaktifkan dalam proses pembelajaran dan ditempatkan sebagai subyek. **Kedua**, siswa lebih banyak dilatih untuk mencari dan menemukan sendiri kemampuan maupun pengetahuan yang akan dikuasai. Siswa akan lebih menangkap dan menguasai nilai itu menjadi miliknya. **Ketiga**, tekanan pembelajaran bukan pada hafalan, tetapi pada kemampuan yang akan dimilikinya dan dikembangkan dalam hidup. **Keempat**, guru harus berperan sebagai fasilitator agar siswa sendiri tekun belajar dan berlatih. **Kelima**, hubungan guru dan siswa lebih bersifat dialogal, mencari bersama, dan saling membantu. **Keenam**, evaluasi yang dilakukan lebih menyeluruh, bukan hanya hasil namun juga proses, seperti penggunaan *assessment portofolio* (Wagiran, 2005: 432).

Kegiatan mengajar merupakan proses inti dari pendidikan sekolah antara pendidik dengan siswa yang melakukan kegiatan aktif dalam membangun makna dan pemahaman. Oleh karena itu kegiatan belajar mengajar haruslah menyatakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Berpusat pada siswa kegiatan belajar mengajar perlu menempatkan siswa sebagai subyek belajar. Artinya KBM/Kegiatan Belajar Mengajar memperhatikan bakat, minat, kemampuan cara dan strategi, motifasi dan later latar belakang siswa.
- b) Belajar dengan melakukan dalam kehidupan nyata atau penerapan konsep atau ide dalam prinsip dan kaidah ilmu yang dipelajari

- c) Mengembangkan kemampuan sosial, artinya mampu berinteraksi dalam kerja kelompok atau diskusi kelompok baik dengan teman maupun guru.
- d) Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan.
- e) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.
- f) Mengembangkan kreatifitas siswa.
- g) Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi.
- h) Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik.
- i) Belajar sepanjang hayat.
- j) Perpaduan kompetensi, kerja sama dan solidaritas
(Depdiknas, 2002: 45)

B. Pembelajaran Berbasis Sekolah

Pembelajaran berbasis sekolah yang merujuk dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan pola pembelajaran berbasis kompetensi dilakukan dengan melakukan langkah mengidentifikasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP kemudian mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mengacu pada standar isi yang telah ditetapkan oleh BNSP, kemudian guru dan pihak-pihak terkait merumuskan indikator pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, menetapkan alat evaluasi (uji kompetensi), merumuskan materi/bahan ajar, metode, media dan sumber-sumber belajar yang dibutuhkan (BNSP, 2006: 7).

Pengembangan KTSP perlu didukung oleh enam standar lainnya selain SI dan SKL seperti yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003. **Standar Kompetensi Lulusan**, untuk menentukan performance yang diharapkan dari siswa setelah melalui proses pembelajaran. **Standar Isi**, untuk menentukan

kedalaman dan keluasan materi minimum yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik. **Standar Proses**, sebagai acuan proses pembelajaran terstandar yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk pelayanan prima bagi siswa (masyarakat). **Standar Penilaian**, sebagai acuan dalam proses evaluasi baik formatif, ataupun sumatif, juga untuk pelaksanaan sertifikasi pada uji kompetensi. **Standar Tenaga Kependidikan**, digunakan sebagai prasyarat kemampuan minimum instruktur atau guru di dalam membimbing siswa untuk menempuh dan mencapai tujuan pembelajaran (standar kompetensi dan kompetensi dasar). **Standar Sarana Dan Prasarana**, standar ini dibutuhkan untuk dapat menjalankan proses pembelajaran yang membutuhkan sarana dan prasarana minimum yang harus disediakan oleh satuan pendidikan, agar dapat mencapai kualitas hasil dan proses pembelajaran. **Standar Pembiayaan**, merupakan standar kebutuhan finansial untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan **Standar Pengelolaan**, standar ini adalah bentuk pelayanan utama yang dapat diketahui dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat pada setiap satuan pendidikan ataupun oleh masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan (UU RI sisdinas, 2003: 13-15).

Menurut E.Mulyasa (2007: 236-238) penerapan KTSP hendaknya dilakukan secara sistematis dan terencana dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. **Pertama**, Perencanaan Pembelajaran adalah suatu persiapan yang disusun oleh pendidik sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang meliputi:

- a. Identitas RPP.
- b. Merumuskan Standar Kompetensi.
- c. Merumuskan Kompetensi Dasar.
- d. Merumuskan indikator-indikator.
- e. Merumuskan tujuan pembelajaran.

- f. Menentukan materi pembelajaran.
- g. menentukan metode pembelajaran.
- h. Menentukan langkah-langkah/skenario pembelajaran.
- i. Menentukan alat, bahan, dan sumber belajar.
- j. Menentukan teknik penilaian.

Kedua, Pelaksanaan Pembelajaran merupakan situasi yang dihadapi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran untuk dapat menyesuaikan pola tingkah lakunya dalam mengajar dengan situasi yang dihadapi. Pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP mencakup tiga hal, yaitu *pretest* (tes awal), pembentukan kompetensi, dan *posttes*. Ketiga hal tersebut dijelaskan berikut ini:

- a. *Pretest* (Tes Awal) yaitu penilaian yang dilaksanakan pada awal dimulainya proses pembelajaran. Pre test ini memiliki banyak kegunaan dalam menjajagi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.
- b. Pembentukan Kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu bagaimana kompetensi dibentuk pada siswa dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh siswa terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya. Kualitas pembentukan kompetensi dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Pada pembelajaran tuntas, kriteria pencapaian kompetensi yang ditetapkan adalah minimal 75% oleh karena itu setiap kegiatan belajar mengajar diakhiri dengan penilaian pencapaian kompetensi siswa dan diikuti rencana tindak lanjutnya.
- c. Post Test (Tes Akhir) yaitu pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan *posttest*. Fungsi post test antara lain: 1). untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. 2). Untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta

kompetensi dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya. 3). Untuk mengetahui siswa yang perlu mengikuti kegiatan remedial, dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar yang dihadapi. 4). Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang telah dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

Ketiga, Penilaian Pembelajaran merupakan pertimbangan tentang jasa, nilai atau manfaat suatu program, proses, dan hasil pembelajaran. Penilaian sebagai proses sistematis yang mengandung informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan: a) Tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. b) Pengamatan kinerja, c) Pengukuran Sikap, d) Penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, e) Penggunaan portofolio, dan f) Penilaian diri.

Menurut Susento (<http://p4-usd.blogspot.co.id/2009/04/pendekatan-dan-strategipembelajaran.html>) terdapat 4 macam pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip KTSP dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu:

1. Pembelajaran langsung bertujuan mengembangkan penguasaan pengetahuan/ketrampilan melalui penyajian langsung oleh guru. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan langkah-langkah kegiatan guru sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa.
 - b. Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan.
 - c. Membimbing siswa berlatih menerapkan pengetahuan/ketrampilan.
 - d. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik.
 - e. Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan.

2. Pembelajaran kontekstual bertujuan mengkaitkan materi ajar dengan situasi dunia nyata yang dikenal siswa. Kegiatan pembelajaran melibatkan kegiatan-kegiatan guru sebagai berikut:
 - a. Kegiatan memfasilitasi.
 - b. Kegiatan mendorong penyelidikan (*inquiry*).
 - c. Kegiatan merangsang bertanya.
 - d. Kegiatan membentuk komunitas belajar (*learning community*).
 - e. Kegiatan pemodelan.
 - f. Kegiatan mendorong refleksi.
 - g. Kegiatan penilaian otentik.
3. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran dengan pemecahan masalah yang penting dan cocok bagi siswa. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan langkah-langkah kegiatan guru sebagai berikut:
 - a. Persiapan: menyusun masalah yang akan dijadikan titik pangkal (*starting point*) pembelajaran.
 - b. Orientasi: menyajikan masalah di kelas dan Memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami situasi atau maksud masalah.
 - c. Eksplorasi: memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah dengan strategi yang diciptakan sendiri oleh siswa.
 - d. Negosiasi: mendorong para siswa untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan proses dan hasil pemecahan masalah, sehingga diperoleh gagasan-gagasan atau tindakan-tindakan yang dapat diterima kelas.
 - e. Integrasi: memandu siswa untuk merefleksikan proses pemecahan masalah, serta merumuskan hasil-hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pemecahan masalah.
4. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan memanfaatkan kelompok-kelompok kecil siswa yang bekerja

bersama untuk mencapai sasaran belajar, dan memungkinkan siswa memaksimalkan proses belajar satu sama lain. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan teknik-teknik antara lain sebagai berikut:

- a. Teknik Sebaran Prestasi (*Student Teams-Achievement Division*): Siswa berkelompok mengerjakan soal latihan dalam lembar kerja. Tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, yang terdiri dari seorang berkemampuan rendah, seorang berkemampuan tinggi, dan sisanya berkemampuan sedang. Setelah semua kelompok selesai bekerja, guru memberi kunci jawaban soal dan meminta diminta memeriksa hasil kerja. Kemudian guru mengadakan ulangan/kuis.
- b. Teknik Susun Gabung (*Jigsaw*): Dalam kelompok, tiap-tiap siswa mempelajari satu bagian materi pelajaran dan kemudian menjelaskan bagian itu kepada semua anggota kelompok. Kemudian guru mengadakan ulangan/kuis.
- c. Teknik Penyelidikan Berkelompok (*Group Investigation*): Tiap-tiap kelompok mempelajari satu bagian materi pelajaran dan kemudian menjelaskan bagian itu kepada semua siswa di kelas.
- d. Teknik Cari Pasangan: Tiap siswa di kelas memperoleh 1 lembar kartu. Tiap kartu berisi 1 bagian materi pelajaran. Kemudian mereka harus mencari siswa-siswa pemegang kartu yang isinya berkaitan dengan isi kartunya. Para siswa yang isi kartunya berkaitan lalu berkelompok dan mendiskusikan keseluruhan materi.
- e. Teknik Tukar Pasangan: Siswa berkelompok mengerjakan soal latihan dalam lembar kerja. Kemudian mereka berganti pasangan kelompok, dan mendiskusikan hasil kerja dari kelompok semula.

C. Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik (*Integrated Thematic Instruction/ITI*) pertama kali dikenalkan pada tahun 1970-an. Awal mula pendekatan pembelajaran ini diberikan dan dikembangkan kepada siswa yang memiliki potensi dan berbakat/bertalenta (*gifted and talented*), cerdas, dan siswa yang belajar dengan cepat (Trianto, 2010: 64). Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan tema dengan mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat menimbulkan pengalaman dan belajar bermakna (Trianto, 2011: 147, Ahmadi dan Amri, 2014: 94). Sedangkan dalam argumen Rusman, pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran terpadu yang memungkinkan siswa secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik (Rusman, 2011: 254).

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian terwujud dalam dua hal, yakni: (1) integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran; dan (2) integrasi berbagai konsep dasar yang terkait. Tema dikemas dalam berbagai konsep sehingga siswa tidak belajar konsep pengetahuan/pemahaman secara terpisah. Oleh sebab itu, pembelajaran dapat bermakna dan berjalan utuh (Rusman, 2011: 255).

Selain itu, pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang satu sama lainnya mengaitkan beberapa aspek mata pelajaran secara intra dan inter mata pelajaran. Siswa tidak hanya didorong untuk mengetahui (*learning to know*), tetapi belajar juga untuk melakukan (*learning to do*), untuk menjadi (*learning to be*) dan untuk hidup bersama (*learning to live together*).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan bagi anak sekolah dasar. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu yang mengkaitkan berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Adanya karakteristik dan konsep belajar yang dapat memunculkan pembelajaran bermakna maka pembelajaran yang tepat untuk anak SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik.

1) **Karakteristik Pembelajaran Tematik**

Beberapa karakteristik Pembelajaran tematik yang harus diperhatikan oleh guru, antara lain; (1) berpusat pada siswa; (2) pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas; (3) mengembangkan keterampilan siswa; (4) menggunakan prinsip bermain sambil belajar; (5) mengembangkan komunikasi siswa; (7) menyajikan pembelajaran sesuai tema; (8) menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai mata pelajaran (Indriani, 2015: 87-88).

Karakteristik pembelajaran tematik yang menjadi pembeda dengan pembelajaran yang lain adalah sebagaimana berikut: (1) Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dengan menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator, (2) Memberikan pengalaman langsung pada peserta didik (*direct experiences*); sehingga siswa belajar secara nyata, (3) Pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu nyata dan jelas yaitu fokus pembelajaran pada pembahasan tema-tema yang terdekat dengan kehidupan siswa, (4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran agar secara utuh dan membantu permasalahan siswa dalam kehidupan sehari-hari, (5) Fleksibel atau luwes, artinya bahan ajar dalam satu mata pelajaran dapat dikaitkan dengan mata pelajaran yang lainnya, (6) Hasil pembelajaran sesuai

dengan minat dan kebutuhan siswa agar mengoptimalkan potensi siswa, (7) Adanya prinsip belajar sambil bermain, sehingga proses pembelajaran bermakna dan menyenangkan (Frasandy, 2017; Suheli, 2018).

Hal ini terkait dengan ungkapan Effendi (2009: 129) bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran bertema dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran dan bermakna. Namun dalam mencari kaitan antara mata pelajaran satu dengan yang lain guru masih merasa kesulitan. Ungkapan yang disampaikan Ibu Sophi salah satu guru dalam penelitian Effendi bahwa dalam pembelajaran tematik penyajian materi berdasarkan pada satu tema yang ditentukan. Dalam satu kali pertemuan disajikan dua atau tiga mata pelajaran yang terkait dengan satu tema tertentu. Dalam hal ini dapat ditemukan bahwa dalam pembelajaran tematik dibutuhkan guru yang kreatif untuk merangkai pembelajaran yang padu. Mencari kaitan antar mata pelajaran sehingga siswa tidak akan merasakan bahwa mata pelajaran sudah berganti. Upaya guru untuk mengatasi kesulitan dalam mengkaitkan tema dengan cara: menggambarkan terlebih dahulu jaringan tema, sehingga akan mudah dalam mencari kaitannya. Dengan menggambarkan jaringan tema serta indikatornya akan memudahkan guru dalam menemukan kaitan dari beberapa mata pelajaran tersebut; membuat skenario pembelajaran yang disesuaikan dengan jaringan tema dan kaitan antar mata pelajaran yang telah ditemukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan (Wahyuni, Setyosari, & Kuswandi, 2016: 134-135).

2) **Prinsip Pembelajaran Tematik**

Pembelajaran tematik yang diterapkan di SD/MI dalam kurikulum 2013 berlandaskan pada Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan bahwa ‖Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Pelaksanaan

kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan melalui pendekatan tematik terpadu/integratif dari kelas I sampai kelas VI Kemendikbud (2013: 189)., Wahyuni, Setyosari & Kuswandi (2016: 132-133) beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual dekat dengan dunia keseharian sisw. Tema dipadukan dengan materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran.
- 2) Pembelajaran tematik perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Dengan demikian, materi-materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna.
- 3) Pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku tetapi sebaliknya pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum.
- 4) Materi pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal.
- 5) Materi awal yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan.

Pendapat lain menyebutkan prinsip-prinsip pembelajaran tematik adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu.
- 2) Pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu nampak.
- 3) Terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap.
- 4) Sumber belajar tidak terbatas pada buku.
- 5) Peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan.
- 6) Guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan mengakomodasikan perbedaan kemampuan siswa.

- 7) Memberikan pengalaman langsung pada peserta didik (*direct experinces*) dari materi yang konkret pada materi abstrak (Hidayah, 2015: 35-37).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik dimaksudkan agar pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Pembelajaran tematik ini memiliki prinsip penting dalam meningkatkan perhatian, aktivitas belajar, dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Pembelajaran lebih berpusat pada siswa dan memberikan pengalaman langsung pada siswa, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.

3) **Kelebihan Pembelajaran Tematik**

Kelebihan dari pembelajaran tematik yaitu: a) Memberikan pengalaman belajar anak karena menyesuaikan perkembangan siswa, b) Kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, c) Aktivitas pembelajaran menjadi bermakna bagi anak sehingga hasilnya dapat bertahan lama, d) Keterampilan berpikir anak berkembang dalam proses pembelajaran, e) Kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis bukan teoritis dan sesuai lingkungan anak, f) Keterampilan sosial anak berkembang dalam proses pembelajaran terpadu (Gandasari, 2019: 88).

Pembelajaran tematik bagi guru antara lain adalah sebagai berikut: 1). tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi pelajaran tidak dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat dilanjutkan sepanjang hari, mencakup berbagai mata pelajaran. 2). Hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. 3). Proses belajar sebagai aktivitas yang kontinyu, tidak terbatas pada buku paket dan jam pelajaran. 4). Guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi, atau topik dari berbagai sudut pandang. 5). Adanya kerja sama dan kolaborasi (Gandasari, 2019: 89).

Sedangkan keuntungan pembelajaran tematik bagi siswa antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Bisa lebih memfokuskan diri pada proses belajar daripada hasil belajar.
- 2) Pendekatan proses belajar yang integratif.
- 3) Menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan; mereka didorong untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan belajar.
- 4) Merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar kelas.
- 5) Membantu siswa membangun hubungan antara konsep dan ide sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman.

Pembelajaran tematik yang merupakan pembelajaran berdasarkan tema-tema tertentu dan ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyediakan keluasaan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 identik dengan pendekatan ilmiah (saintifik). Berikut ini konsep teoritis pendekatan saintifik.

D. Refleksi Inovasi Pembelajaran di Indonesia.



KULIAH LUAR NEGERI DARING, INOVASI MODEL BARU PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI

KOMPAS.com - Masa pandemi melahirkan sejumlah terobosan baru dalam pembelajaran tingkat pendidikan tinggi. Salah satunya, kolaborasi dengan universitas luar negeri dalam melakukan pembelajaran daring tanpa harus "merantau" ke negara lain. —Dengan banyaknya negara yang menutup pintu akan kedatangan warga Indonesia, termasuk yang membatasi jumlah kedatangan akibat tingginya angka kasus positif Covid-19," ungkap Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji.

Arizona State University, merupakan perguruan tinggi di Amerika Serikat dengan predikat sebagai peringkat 1 persen teratas perguruan tinggi dunia dan perguruan tinggi paling inovatif meluncurkan program kuliah daring, baik program S1 maupun S2. Program ini memberikan kesempatan tidak hanya bagi mereka yang telah lulus jenjang SMA sederajat, tetapi juga bagi siswa yang masih duduk di bangku SMA sudah dapat mengikuti program perkuliahan untuk semua jurusan. —Program kemitraan ini juga menawarkan sebuah konsep baru yang disebut Early College Experie nec, yaitu dua puluh enam (26) mata kuliah dari berbagai fakultas yang dapat diambil oleh mereka yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas," jelas Indra. Dengan mengikuti program ini, para siswa dapat menyelesaikan sampai dengan empat semester semua mata kuliah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gelar strata satu. Artinya, setelah lulus SMA, peserta program cukup menyelesaikan sisa empat semester lagi, baik dengan melanjutkan program daring, kuliah tatap muka di Arizona State University, maupun pindah kuliah ke perguruan tinggi lain yang diinginkan karena nilai mata kuliah tersebut dapat ditransfer.

La mengatakan, program kuliah online dari Arizona State University ini merupakan solusi tepat dalam menjalankan program perguruan tinggi di tengah pandemi yang sangat tidak menentu ini. "Mahasiswa tetap dapat belajar untuk menyelesaikan gelar sarjannya tanpa harus meninggalkan rumah, biaya sangat terjangkau, dan apabila pandemi telah berakhir, mereka dapat melanjutkan kuliah secara tatap muka baik di Arizona State University maupun di perguruan tinggi lain," kata Indra. Dengan program ini, lanjut Indra, selain mempersingkat waktu kuliah dan meringankan biaya, tetapi juga memastikan aman dari pandemi covid-19 tanpa mengorbankan mutu.

Sumber: <https://dukasi.kompas.com/read/2020/12/08/180319671/kuliah-luar-negeri-daring-inovasi-model-baru-pembelajaran-di-masa-pandemi?page=all>

INOVASI PENDIDIKAN DALAM SITUASI PANDEMI

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal, terutama pola hidup sehari-hari, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menyesuaikan diri. "Semua tahu, kita sedang dan akan menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi, bukan berarti kita tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi uncertainty inilah kemampuan adaptif sangat kita butuhkan," kata Guru Besar UI dan Founder Rumah Perubahan Renald Khasali dalam tulisannya, "Virus Bermutasi, Manusia Beradaptasi". Renald menerangkan, tiap kali manusia berhadapan dengan kesulitan, maka inovasi muncul. "Dulu, banyak orang yang tak bisa mengonsumsi cokelat karena harganya yang sangat mahal. Pada 1963, Michele Ferrero dari Italia berinovasi mencampur cokelat yang mahal dengan gula, minyak, susu, dan kacang hazelnut. Lahirlah Nutella yang kemudian mendunia sebagai alternatif pengganti cokelat untuk dimakan bersama roti."

Saat ini, inovasi tentu sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Sebagaimana diketahui bersama, untuk mencegah penyebaran Covid-19, sekolah hingga universitas mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau remote learning. Di sinilah pentingnya orangtua, guru, dan murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajaran melalui penggunaan teknologi. "Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan." Cuitan Najwa Shihab pada 2015 itu tentu akan senantiasa relevan, terlebih dalam kondisi sekarang. Murid bisa belajar secara daring dengan pendampingan guru, sementara orangtua bisa membantu memonitor perkembangan belajar anak. Walau begitu, inovasi tak selalu berjalan mulus alias ada saja kendalanya yang gagap teknologi sampai dengan kesenjangan akses internet dan terbatasnya media belajar. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan inovasi dan memberikan berlimpah perbaikan sistem pembelajaran, di antaranya, kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penayangan program Belajar dari Rumah yang disiarkan di TVRI bagi guru-murid dengan keterbatasan internet.

Covid-19 membuat semua orang harus keluar dari zona nyaman. "Satu-satunya cara untuk benar-benar belajar dan tumbuh sebagai individu, mau itu murid atau orang dewasa adalah untuk keluar dari zona nyaman kita. Di situ level pembelajaran paling optimal," ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadhim Makarim. Keluarnya semua orang dari zona nyaman masing-masing bakal melatih karakter adaptif, inovatif, dan kreatif komunitas pendidikan. Dalam ungkapan Renald, "Kemampuan beradaptasi itu akan muncul beringin dengan daya inovasi." Sistem PJJ masih terus dikaji agar lebih fleksibel dan sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar—reformasi sistem pendidikan yang belum lama ini dicanangkan Kemendikbud. Konsep ini memberikan kemerdekaan bagi tiap unit pendidikan untuk berinovasi, salah satunya, ya melalui teknologi.

Nadhim pun berpesan kepada para guru, "Dalam krisis ini saatnya mencoba hal-hal yang dulu mungkin kita masih ragu, tapi di dalam hati kita merasa ini yang terbaik untuk para murid." Posisinya, situasi PJJ justru membawa hikmah karena ketika pandemi berakhir, salah satu hal yang menjadi kebiasaan baru masyarakat adalah kemampuan untuk bisa beraktivitas di mana saja. Orang-orang akan terbiasa dengan digitalisasi. "Potensi kita untuk bekerja dan menjadi efektif dari mana pun itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat baru buat kita," ujar Nadhim. Kombinasi pembelajaran tatap muka dan jarak jauh ini dinilai memiliki potensi luar biasa untuk memajukan pendidikan nasional. "Inilah saatnya guru dan orangtua berinovasi dengan melakukan banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya," terang Nadhim, karena secanggih apa pun teknologi, sebesar apa pun inovasi pendidikan, peran guru sebagai pendidik tak akan tergantikan. "Konsepnya bukan untuk menggantikan guru, tetapi teknologi itu untuk memperkuat potensi guru."

E. Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

1. Jelaskan pendapat Anda pembelajaran daring pada masa pandemic Covid-19 ?
2. Jelaskan dan berikan contoh salahsatu ciri pembelajaran tematik yaitu adanya pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu nyata dan jelas yaitu fokus pembelajaran pada pembahasan tema-tema yang terdekat dengan kehidupan siswa !
3. Berikan 5 kelemahan pembelajaran daring yang Anda ketahui !

BAB IV KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kompetensi Dasar :

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami makna kebijakan pendidikan.
2. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan dasar
3. Mengidentifikasi acuan pada pelaku kebijakan untuk mengembangkan dunia pendidikan menengah
4. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan tinggi
5. Menyebutkan kasus kebijakan pendidikan di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, demikian juga dengan bidang pendidikannya. Semakin tinggi kualitas pendidikan maka diharapkan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. Maka, secara tidak langsung memberikan

pada pelaku kebijakan untuk mengembangkan dunia pendidikan. Menurut Budiardjo (Subandi, 2005: 13) menyatakan bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu

mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Argumen Jalal dan Supriadi (Nyoman Dantes, 2008: 4-5) disebutkan bahwa terdapat tiga titik pijak sebagai dasar pengembangan pendidikan di Indonesia yaitu acuan filosofis, acuan nilai kultural, dan acuan lingkungan strategis. *Pertama*, acuan

filosofis yaitu atas dasar abstraksi acuan hukum dan kajian empiris tentang kondisi sekarang serta idealisasi masa depan. Artinya bahwa dalam filosofis pendidikan perlu memiliki ciri: mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban, mendukung diseminasi dan nilai keunggulan, mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan dan keagamaan; serta mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral. Selain acuan filosofis dalam pendidikan kita juga yang **Kedua** harus memiliki acuan nilai kultural. Artinya dalam berjenjang mulai dari jenjang nilai ideal, nilai instrumental, sampai pada nilai operasional. Pada tingkat ideal, acuan pendidikan adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keunggulan. Pada tingkat instrumental, nilai-nilai yang penting perlu dikembangkan melalui pendidikan adalah otonomi, kecakapan, kesadaran berdemokrasi, kreativitas, daya saing, estetika, kearifan, moral, harkat, martabat dan kebanggaan. Pada tingkat operasional, pendidikan harus menanamkan pentingnya kerja keras, sportifitas, kesiapan bersaing, dan sekaligus bekerjasama dan disiplin diri. Sedangkan yang **Ketiga** adalah acuan lingkungan strategis mencakup lingkungan nasional dan lingkungan global. Lingkungan nasional meliputi perubahan demografis seperti penyebaran penduduk yang tidak merata dan program Keluarga Berencana (KB), pengaruh ekonomi yang tidak merata sehingga penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat, pengaruh sumber kekayaan alam yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan yang baik, dimana munculnya nilai-nilai baru di masyarakat seperti kerja keras, keunggulan, dan ketepatan waktu, dan pengaruh politik yang sejak era reformasi terasa sangat labil. Lingkungan global ditandai antara lain dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga kita tidak bisa menjadi warga lokal dan nasional saja, tetapi juga warga dunia.

Dengan demikian, penting adanya acuan filosofis, kultural dan lingkungan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan. Pada dasarnya arti kata kebijakan (*policy*) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu —*Polis* yang artinya kota (*city*). Oleh sebab itu, kebijakan berkaitan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008: 75). Sementara itu, kebijakan menurut (Noeng Muhadjir, 1996: 15) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan juga dipilih sesuai dengan empat aspek berikut: (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Sementara itu, kebijakan pendidikan sebagai bagian dari keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu (H. A. R Tilaar, 2009: 140). Dalam pandangan Irianto (2011: 12) bahwa kebijakan pendidikan dipandang dari sudut keilmuan filsafat artinya bahwa ilmu pendidikan lebih menekankan pada perkembangan siswa dan bagaimana pendidikan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa sehingga menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Disisi lain, argumen Duke dan Canady (Syafaruddin, 2008: 118) kebijakan pendidikan diistilahkan dengan istilah kebijakan sekolah yaitu kerja sama dan keputusan oleh individu atau keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah dari dewan sekolah, pengawas, administrator sekolah atau komite sekolah dan tanggung jawab bagi kontrak negosiasi.

Siklus pengembangan kebijakan minimal terdiri dari tiga langkah utama yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Keseluruhan dari 3 tahap tersebut terbagi dalam 6 kegiatan yaitu:

1. *Agenda Setting*.
2. *Policy Formulation*.
3. *Choice of Solutions*.
4. *Policy Design*.
5. *Policy Implementation*.
6. *Evaluation* (Anderson, 2003: 2)

Di samping itu, dalam merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan landasan pemikiran yang mempertimbangkan aneka komponen suatu kebijakan pendidikan yang mencakup lima aspek yaitu: *goal* (tujuan), *plan* (rencana), *programme* (program), *decision* (keputusan), dan *effects/dampak* (Arif Rohman, 2012: 94)

Komponen pertama dari perumusan kebijakan pendidikan adalah tujuan kebijakan itu sendiri. Menurut Nanang Fattah (2013: 89) terdapat 4 tujuan kebijakan pendidikan, yaitu:

1. Tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkatan masyarakat merupakan analisis kebijakan pendidikan dengan melihat pada fakta dan realita yang tersebar luas di masyarakat dan dikarenakan pendidikan dalam arti umum. Karena pendidikan diharapkan sebagai suatu proses penanaman dan mentransfer nilai-nilai yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa baik dari segi pengetahuan maupun karakter.
2. Tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkatan politisi yaitu kebijakan pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif supaya tercipta generasi masyarakat dalam aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga wawasan, sikap, dan perilakunya semakin demokratis.
3. Tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkatan ekonomi yaitu adanya pentingnya kesadaran pendidikan sebagai investasi jangka panjang, yang didasarkan pada beberapa alasan:
a) pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan

bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pendidikan dapat berperan sebagai pasokan energi yang terus menjamin keberlangsungan serta pengembangan ekonomi. b) karena pendidikan merupakan dasar yang perlu dikuasai untuk memacu produktivitas serta kinerja perekonomian secara nasional. c) pendidikan dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh untuk memajukan kesejahteraan dengan menciptakan berbagai usaha kreatif serta inovatif dalam rangka upaya pengurangan angka pengangguran yang terjadi terutama di negara tertinggal maupun berkembang bahkan di negara maju.

Selain dari tujuan kebijakan yang mengarah pada tingkatan masyarakat, politik, dan ekonomi, dalam analisis Nanang Fattah (2013: 132-133) memberikan argumen tentang fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah:

1. Menyediakan akuntabilitas norma budaya seperti adanya pendidikan karakter kepribadian pada masing-masing sekolah. Maka dalam hal ini sekolah harus konsekuen dan bertanggung jawab untuk bertugas menjalankan maupun memasukan pendidikan karakter sebagai penyedia layanan pendidikan.
2. Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Artinya adanya tim untuk mengevaluasi maupun melakukan pengawasan pendidikan sebagai upaya untuk menjamin ataupun menilai kualitas pendidikan.

Patton dan Sawicki (1986: 182-185) mengidentifikasi beberapa metode dalam perumusan kebijakan yaitu:

Tabel 4.1. Metode Kebijakan

No	Metode Kebijakan	Isi Konsep
1.	Metode Status Quo (<i>no action</i>)	Alternative dipilih apabila pengelola sekolah merasa bahwa suatu masalah hanya dapat diperbaiki dengan suatu alternative kebijakan. Salahsatu

		<p>alternative kebijakan yang ditawarkan adalah alternatif status quo karena beberapa alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan dana untuk membuat kebijakan baru. Dengan kebijakan status quo sudah dapat mencapai sasaran kebijakan. Kebijakan status quo dapat mengurangi tindakan, Status quo merupakan solusi yang terbaik karena masalahnya sangat pelik sehingga tidak ada solusi yang dirasa optimal.
2.	Metode Survei Cepat (Quick Survey).	<p>Analisis kebijakan dengan menanyakan kepada teman atau kelompok tertentu mengenai suatu masalah dan meminta saran memecahkan masalah tersebut. Ini dimaksudkan untuk mendapat berbagai ide yang baik dalam memecahkan masalah.</p>
3.	Tinjauan Pustaka (Literature Review).	<p>Berbagai sumber <i>literature</i> yang berisi pengetahuan teoritik dan kasus diberbagai bidang dapat juga dijadikan sebagai sumber yang dapat menawarkan alternatif kebijakan terhadap masalah yang dihadapi</p>
4.	Belajar dari Pengalaman Nyata	<p>Memperoleh informasi tentang kebijakan yang nyata apabila masalah yang dihadapi memiliki kesamaan setting. Tujuan utama metode ini bukan mengidentifikasi salah satu metode yang paling baik, melainkan untuk mengetahui</p>

		pengalaman yang memperlihatkan bahwa suatu alternative dapat diimplementasikan.
5.	Metode Analogy, <i>methaphor</i> , dan <i>sinetic</i> .	Analogi dan <i>metaphor</i> untuk memecahkan masalah baik untuk membantu analisis menemukan solusi terhadap suatu masalah karena mereka tidak mengenali bahwa sebenarnya masalah yang mereka hadapi adalah masalah lama. Sedang sinetik adalah metode pemecahan masalah dalam kelompok melalui diskusi sehingga kesempatan menemukan alternatifnya lebih tinggi.
6.	Curah pendapat (<i>Brainstroming</i>).	Metode ini untuk menghasilkan checklist ide/gagasan untuk memecahkan masalah. Derajat <i>brainstorming</i> dapat bervariasi dari pembicaraan informal, pertemuan antar anggota <i>staff</i> , para pakar, dan konsultan. Ini mengandung arti bahwa <i>brainstorming</i> menunjuk pada diskusi kelompok tentang masalah dan berbagai kemungkinan alternatif pemecahannya.

Maka usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu:

1. Meningkatkan anggaran pendidikan artinya bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menanggung biaya pendidikan bagi warganya, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Manajemen pengelolaan pendidikan yang baik harus memperhatikan profesionalisme dan kreativitas lembaga penyelenggara pendidikan.

3. Bebaskan sekolah dari suasana bisnis karena sekolah bukan merupakan ladang bisnis bagi pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru maupun perusahaan swasta.
4. Perbaiki kurikulum artinya penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan segala potensi alam, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada. Pendidikan demokratis harus membekali warga negara dengan dasar yang teguh dalam sosio-ekonomis, mendorong tanggung jawab dan tindakan yang berani di segala bidang, memerangi penyalahgunaan propaganda.
5. Pendidikan agama di sekolah bukan sebagai penyampaian dogma atau pengetahuan salah satu agama tertentu pada siswa tetapi sebagai penginternasionalisasian nilai-nilai kebaikan, kerendahan hati, cinta kasih dan sebagainya.
6. Pendidikan yang melatih kesadaran kritis artinya sikap yang kritis dan toleran, akan merangsang tumbuhnya kepekaan sosial dan rasa keadilan. Oleh karena itu diharapkan bisa mengatasi kemelut sosial, budaya, politik dan ekonomi bangsa ini.
7. Pemberdayaan guru artinya bahwa guru hendaknya lebih kreatif, inovatif, terampil, berani berinisiatif serta memiliki sikap politik yang jelas. Selain itu, pemerintah diharapkan memberdayakan guru dengan program-program latihan sehingga mereka mampu mengembangkan model-model pengajaran secara variatif.
8. Memperbaiki kesejahteraan guru yaitu guru merupakan faktor dominan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu upaya perbaikan kesejahteraan guru perlu ditingkatkan. Sehingga guru tidak hanya dituntut untuk meningkatkan wawasan maupun mutu mengajarnya serta menghasilkan *output* yang baik (Darmaningtyas, 1999: 3)

Usaha dalam menaikkan mutu pendidikan diimbangi dengan adanya proses kebijakan pendidikan yang berkesinambungan dan saling mendukung satu sama lain. Proses kebijakan dapat

digambarkan sebagai suatu sistem yaitu ada input, proses dan output. Input proses kebijakan adalah isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berupa perumusan formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan merupakan proses politik yang dilakukan elit politik dan kelompok-kelompok penekan. Sementara output dari suatu proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Jurnal Media Edukasi Pendidikan Teknologi dan Kejuaran, 2010: 56).

Proses kebijakan pendidikan diperlukan perencanaan yang matang, terlebih perencanaan tersebut dirumuskan dalam beberapa pendekatan berikut ini:

Yang *pertama*, Pendekatan *Social Demand Approach* (kebutuhan sosial) adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan bermula dari aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini para pengambil kebijakan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.

Yang *kedua*, Pendekatan *Man-Power Approach* yaitu pendekatan dengan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Sebagai contoh dengan

adanya peran pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Sehingga adakalanya pendekatan ini disebut sebagai pendekatan yang bersifat otoriter. *Man-power* menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan. Misalkan saja, perumusan kebijakan tidak diawali dari aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner. Namun dari sisi positifnya, dalam pendekatan *man-power* ini proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dalam proses perumusannya, serta lebih berdimensi jangka panjang (Arif Rohman, 2009: 114-118).

Sedangkan dalam argumen Ali Imron (2008: 31) menyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan pendidikan berawal dari tahapan-tahapan yang berproses dari: perumusan kebijakan pendidikan, legitimasi kebijakan pendidikan, komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Berbicara tentang perumusan kebijakan yang direncanakan dengan matang dan sistematis, maka diperlukan adanya arah kebijakan itu sendiri. Arah kebijakan pendidikan menurut Rochmat Wahab (2004: 3), yaitu:

1. Pemberdayaan lembaga pendidikan kebijakan pendidikan nasional pada semua jenjang baik kini maupun ke depan terutama telah diarahkan kepada pemberdayaan lembaga pendidikan, sehingga memiliki otonomi yang tinggi dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Pemberdayaan lembaga pendidikan ini lebih didasarkan pada pemberian *trust* kepada lembaga untuk mengelola dirinya sendiri secara bertanggung jawab.

2. Desentralisasi pendidikan keragaman yang dimiliki oleh lembaga pendidikan baik dilihat dari jenis dan njenjangnya tidaklah relevan lagi jika semua pengelolaan pendidikan disentralkan, sebagaimana pada era-era sebelumnya. Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat mewujudkan setiap program dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga dapat dijamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
3. Akuntabilitas pendidikan yaitu pertanggungjawaban kepada publik untuk kegiatan pendidikan tidak hanya menghabiskan biaya yang telah disepakati, namun sejauh mana dapat diwujudkan dalam kegiatan yang bermakna. Maka setiap institusi seharusnya mampu menunjukkan kinerjanya secara bertanggung jawab sebagaimana amanat yang telah diberikan.
4. Relevansi Pendidikan Program pendidikan dan kurikulum telah dilakukan perbaikan secara terus menerus yang diharapkan dapat menyiapkan lulusan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan pada jamannya. Namun lepas dari itu tetap berbagai kegiatan yang diciptakan perlu dirahkan juga untuk membekali siswa dalam menghadapi kebutuhan dalam hidupnya.
5. Pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk mendukung terjadinya proses pendidikan, masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi, baik secara finansial maupun substantive, sehingga mereka ikut memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses pendidikan yang ada di sekitarnya.

Sedangkan menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) rancang enam program prioritas pendidikan dan kebudayaan tahun 2016. *Pertama*, penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, dengan melakukan pemberdayaan melalui peningkatan kompetensi,

kinerja, dan apresiasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya pemberdayaan dilakukan dengan melakukan kemitraan dan penguatan peran orang tua, dan pelibatan. **Kedua**, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. **Ketiga**, meningkatkan akses dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dengan penyediaan guru garis depan, peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja, pemberian tunjangan atau insentif bagi guru non-PNS, dan peningkatan kualifikasi pendidikan. **Keempat**, Kemendikbud akan melakukan peningkatan dan penguatan pelestarian dan diplomasi budaya, dengan penetapan dan revitalisasi warisan budaya, pengembangan budaya dengan melakukan penelitian, pelatihan, pembangunan, dan modernisasi. **Kelima**, peningkatan dan penguatan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa melalui pengembangan kosakata, penyebarluasan Bahasa Indonesia di luar negeri. Program prioritas keenam dan menjadi sasaran utama Kemendikbud dalam melakukan gerakan pendidikan dan kebudayaan adalah penguatan tata kelola dan pelibatan publik.

Selain itu, terdapat beberapa program kebijakan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
5. Melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Sebagai upaya melancarkan dan kesuksesan beberapa program di atas, diperlukan beberapa strategi kebijakan pendidikan antara lain: (1) demokratisasi pendidikan, upaya dapat dilakukan dengan mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan pendidikan untuk semua, memungkinkan terjadinya pemberdayaan dan pendayagunaan

institusi masyarakat, memberikan perhatian tersendiri terhadap kelompok khusus, dan mengupayakan pendirian unit pendidikan.

(2) Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang yang diwujudkan dengan melakukan pembaharuan kurikulum pada semua jenjang, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas proses dan evaluasi pendidikan, meningkatkan peran supervisi pendidikan, dan meningkatkan kualitas penelitian. (3) Meningkatkan relevansi pendidikan yang dapat dimanifestasikan dengan pengembangan kecakapan dasar, menata program sesuai dengan kepentingan kelanjutan studi dan memasuki dunia kerja, menciptakan proses pendidikan yang manusiawi, dan membangun iklim pendidikan yang inklusif. (4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan yang dapat diwujudkan dengan penegakan Manajemen Berbasis Sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat, penegakan otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi, penerapan dalam pendanaan pendidikan yang berbasis kinerja, dan pemantapan keberadaan dan fungsi akreditasi lembaga pendidikan semua jenjang, dan mengupayakan debirokratisasi pendidikan (Rochmat Wahab, 2004: 3).

Setelah kebijakan pendidikan dirumuskan tujuan, perencanaan program, arah, dan strategi kebijakannya, kemudian melakukan suatu implementasi. Implementasi yang dimaksud merupakan pelaksanaan dari kebijakan pendidikan yang telah dirancang sebelumnya tersebut. Implementasi ini telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai bagaimana memutuskan suatu keputusan dalam inovasi. Kebijakan pendidikan senantiasa berkembang secara dinamis berdasarkan kebutuhan mutu lulusan pendidikan di masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan sebagai salah satu inovasi dalam dunia pendidikan yang meliputi aspek perencanaan program kurikulum ataupun pembelajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, dampak implementasi pasca memutuskan kebijakan pendidikan juga telah dibahas dalam konsep dasar inovasi. Dimana suatu keputusan inovasi akan

berdampak pada penerimaan atau penolakan. Karena pada dasarnya kebijakan pendidikan yang dirancang, baik dari pemerintah pusat atau daerah akan berdampak pada keseimbangan dan keselarasan dari proses pendidikan. Selain itu, adanya kebijakan pendidikan yang baru berarti adanya suatu proses adaptasi atau penyesuaian pula dari semua unsur pelaksana pendidikan. Karena adaptasi juga penting diperlukan untuk memantapkan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian dampak dari kebijakan juga tergantung dari kondisi dan situasi yang ada di masyarakat, disamping sifat dan karakter masyarakat ataupun pelaku dan pelaksana kebijakan beragam dari berbagai unsur.

Adapun keputusan itu sendiri memiliki arti adanya pengambilan keputusan penting bagi administrator pendidikan karena merupakan suatu proses memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi sekolah mengambil keputusan secara hierarkis. Keputusan yang diambil administrator berpengaruh terhadap pelanggan pendidikan terutama peserta didik. Oleh karena itu, setiap administrator pendidikan harus memiliki keterampilan mengambil keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien (Husaini Usman, 2010: 392).

Langkah-langkah pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Mondy dan Premeaux (Syafaruddin & Anzinzhan, 2008: 55-56) yang terdiri dari lima langkah berikut ini:

- a. Mengidentifikasi masalah atau peluang.
- b. Membuat alternatif-alternatif.
- c. Mengevaluasi alternatif.
- d. Memiliki dan mengimplementasikan alternatif.
- e. Mengavaluasi alternatif.

Syafaruddin (2005: 57-58) menambahkan bahwa pembagian jenis keputusan berdasarkan masalah yang dihadapi, yaitu: **Pertama**, keputusan yang diprogramkan (*programmed decesion*) adalah keputusan yang dibuat berdasarkan problem yang

diketahui secara baik atau masalahnya diketahui secara jelas. Demikian pula informasinya dapat dinilai relevansinya untuk mengambil keputusan. Fakta-fakta dan angka-angka serta data diolah untuk memberikan informasi yang bermakna sehingga keputusan bisa diprogramkan. **Kedua**, keputusan yang tidak diprogramkan (*Non-programmed decesion*) adalah keputusan yang diambil atau dibuat berdasarkan masalah yang tidak diketahui secara jelas atau data dan informasinya kurang tersedia sebagaimana mestinya.

Sementara itu, dalam pendapat Anderson (2003: 72-78), terdapat enam kriteria keputusan yang menjadi pertimbangan setiap individu dalam pengambilan keputusan kebijakan, yaitu:

- 1) Nilai, artinya nilai berkaitan dengan kesadaran dalam membuat pilihan yang muncul pada saat individu terlibat dalam pengambilan keputusan. Setiap individu memiliki preferensi nilai yang muncul baik secara sadar maupun tidak mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan.
- 2) Afiliasi partai politik yaitu kesetiaan pada partai merupakan kriteria yang signifikan meskipun seringkali sulit memisahkan dari pertimbangan lain seperti pengaruh pemimpin atau komitmen ideologis. Kriteria ini kadang berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang memuat isu kebijakan yang diusung oleh partai.
- 3) Kepentingan konstituen yaitu adanya dukungan suara dari konstituen dalam pemilihan umum sangat penting bagi partai. Konsekuensinya adalah keharusan dari partai untuk memperhatikan kepentingan dari konstituen (publik). Proses legislasi untuk pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah tapi juga keinginan dari masyarakat yang diwakili.
- 4) Opini publik yaitu suara publik menjadi kriteria dalam pembuatan keputusan untuk kebijakan yang merupakan

pencerminan keinginan masyarakat sekaligus pendapat masyarakat tentang tindakan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

- 5) Pendapat pejabat/pimpinan (*deference*) yaitu berbeda pendapat dengan pimpinan atau pejabat yang berpengaruh seringkali menciptakan keengganan atau rasa sungkan pada diri individu lain.
- 6) Peraturan perundang-undangan yaitu adanya peraturan bersifat kaku dan menjadi hak pemerintah pusat untuk menterjemahkannya. Kondisi ini menyulitkan karena terdapat keragaman antar daerah. Meski demikian daerah harus tetap menjalankan peraturan tersebut karena menjadi rambu-rambu bagi daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kebijakan pendidikan pada dasarnya meliputi kategori jenjang tertentu dalam mengarahkan kebijakannya. Berikut ini kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia yang bermula dari kebijakan pendidikan dasar, kebijakan pendidikan menengah, dan kebijakan pendidikan tinggi. Masing-masing jenjang kebijakan tersebut memiliki porsi tujuan dan rencana program masing-masing. Adapun penjelasan masing-masing kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut.

A. Kebijakan Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah dan diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas, terdiri atas (1) Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat, contoh : Program paket —AII; Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, contoh : program paket —BII.

Dalam UU No. 2 tahun 1989, pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan

serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan siswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Sedangkan pengertian Yunani pendidikan adalah ilmu menuntun anak. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yaitu: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Pendidikan Dasar berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan (<https://no3vie.wordpress.com/dasar-pendidikan-pendidikan-dasar/>).

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah dan sejalan dengan itu UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi dari keinginan era reformasi untuk menghidupkan kehidupan demokrasi. Maka kebijakan yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (*School Based Management*) yang memberi kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan; (2) Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (*community based education*) agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai

community learning centre; dan (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning* paradigma yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan.

(4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan *Broad Base Education System* (BBE) yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera.

Menurut pendapat UNESCO dalam bukunya *Education for All in the Asia-Pacific Region* (Ished, 2010: 5-6) bahwa kebijakan pendidikan dasar yang bermutu, merata, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan semua warga negara. Oleh karena itu, pendidikan dasar bertujuan membentuk karakter dan mengembangkan kemampuan dasar bagi semua warga negara secara adil tanpa membedakan suku bangsa, golongan, jenis kelamin, serta latar belakang sosial-ekonomi. Kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi ini bukan pada ukuran gedung SD/SMP, guru, dan sarana belajar di sekolah, serta banyak pengetahuan hafalan bagi siswa, tetapi diukur dari dampak pembentukan kemampuan dasar untuk belajar dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia yang bertanggungjawab.

Pendidikan di sekolah dasar merupakan pondasi perkembangan kemampuan berpikir dan belajar anak berpengaruh dan mempengaruhi pada jenjang yang selanjutnya. Perkembangan mental, fisik, serta inteligensi anak terpusat pada usia antara 0 tahun sampai dengan 12 tahun. Masa-masa tersebut merupakan masa keemasan bagi pertumbuhan anak, baik fisik maupun psikisnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Di sekolah dasar merupakan pusat dinamika pendidikan anak yang utama. Anak sekolah dasar akan lebih peka dan tajam dalam menyerap segala pengetahuannya. Oleh karena itu, agar tahap perkembangan belajar anak sekolah dasar dapat berjalan dengan optimal, diperlukan kedisiplinan pembelajaran yang berkesinambungan. sekolah bukan hanya tempat untuk belajar dan mencari ilmu saja tetapi yang lebih penting keberadaan sekolah dapat membawa

siswa nyaman, senang, dan menyenangkan dalam belajar sehingga siswa merasa betah dan menumbuhkan motivasi belajar siswa

Kebijakan pendidikan dasar merupakan program secara integral yang meliputi program:

- a. Pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah program pendidikan yang meliputi materi Pendidikan Agama, PKN dan Sejarah Nasional, Olahraga, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan yang tidak dilakukan melalui pengajaran kognitif di kelas tetapi merupakan rangkaian kegiatan siswa secara sistematis-terprogram di sekolah seperti: berdoa bersama, sembahyang berjamaah, peringatan hari besar, upacara, cara berdemokrasi, kegiatan ekonomi produktif, kompetisi olahraga dan musik, kebersihan diri dan lingkungan, serta mengerjakan prakarya.
- b. Kemampuan dasar untuk belajar (*basic learning tools*) adalah program pendidikan yang meliputi materi pelajaran bahasa Indonesia dan matematik melalui lima jenis literasi dasar, yaitu:
 - (a) *membaca*, memahami materi bacaan dengan cepat;
 - (b) *menulis*, menuangkan gagasan melalui tulisan sederhana dan mudah difahami;
 - (c) *menyimak*, menangkap isi pembicaraan orang lain secara cepat dan tepat;
 - (d) *menutur*, mengungkapkan gagasan secara lisan dengan sederhana dan mudah difahami;
 - (e) *berhitung*, memahami logika angka, bidang dan ruang dalam praktek sehari-hari. Kelima jenis literasi dasar tersebut bukan hanya harus diajarkan tetapi harus secara intensif dilatihkan kepada siswa paling tidak 3-4 jam setiap harinya.
- c. Substansi belajar dasar (*basic learning content*) adalah program pendidikan dasar yang terdiri dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan pendidikan literasi ekonomi. Proses belajar IPS, IPA, dan literasi ekonomi dilakukan dengan melatih ketajaman siswa melalui dalam mengamati dan memecahkan berbagai permasalahan lingkungan dengan memanfaatkan kemampuan siswa dalam

membaca, menulis, menyajikan secara lisan, dan melaporkan secara tertulis.

B. Kebijakan Pendidikan Menengah

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2013 pada pasal 1 ayat 2 bahwa Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Oleh karena itu, pendidikan Menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar, diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Sisdiknas, terdiri atas : Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau bentuk lain yang sederajat, contoh : program paket —CI, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Tujuan pokok kebijakan pendidikan menengah sebagai usaha untuk menciptakan pendidikan yang siap kerja. Seperti yang ditetapkan oleh Depdiknas (Ished, 2010: 7) adalah menghasilkan pelaku ekonomi produktif, baik sebagai pekerja kreatif maupun sebagai pengusaha mandiri. Depdiknas harus menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang memiliki lulusan pendidikan yang terampil, ahli, dan profesional dalam perspektif mereka sebagai *users*. Keberhasilan pendidikan persiapan kerja bukan diukur dari ujian nasional atau ijazah, tetapi diukur dari para pemakai lulusan seperti: daya-serap lapangan kerja, tingkat produktivitas, peningkatan karier, serta penghasilan para lulusan pendidikan. Maka, dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan kejuruan, Depdiknas perlu berkoordinasi secara sistemik dengan para pemegang kebijakan dan program perekonomian nasional, serta dengan dunia usaha dan dunia industri.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh BNSP (2006) Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah

dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut.

1. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya

Dalam pandangan Udin Saefuddin dan Mulyani Sumantri Dalam pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan menengah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut .

- a. Didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi siswa untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya.
- b. Menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepadatuhan Yang Maha Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati, (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4), belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- c. Memungkinkan siswa mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik.
- d. Suasana hubungan siswa dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat.
- e. Menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.
- f. Mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.

- g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas.

Pendidikan menengah dalam program pembanguna nasional mencakup SMU, SMK dan MA ditujukan untuk: (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK dan MA bagi seluruh masyarakat; (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja; (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendidikan yang tersedia; (5) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik; (6) meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan kondisi setempat; (7) meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan; (8) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan; dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

C. Kebijakan Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi serta diatur dalam pasal 19, UU Sisdiknas.

Berdasarkan kategori pendidikan tinggi di atas, menurut Mr Jamil menekankan tiga aspek dalam perkembangan pendidikan tinggi yaitu: pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan, perubahan akan kebutuhan dan praktek pendidikan tinggi serta dampak dan manfaat pendidikan tinggi bagi negara berkembang.

Maka, perguruan tinggi harus memperbaharui ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan yang sangat berkaitan erat dengan kebutuhan daerah masing-masing. Bidang ilmu seperti seismologi, vulkanologi dan klimatologi adalah bidang ilmu yang harus dikembangkan di daerah yang rawan bencana. Adapun bagi perguruan tinggi di negara berkembang, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu kualitas pendidikan dan relevansinya, pendanaan yang berkelanjutan dan fleksibilitas berkesinambungan (<http://dikti.go.id/blog/2012/02/03/berbagi-perspektif-kebijakan-pendidikan-tinggi/>).

Pemerintah memberikan layanan pendidikan tinggi dan riset dalam berbagai cabang dan tingkatan iptek. Pembinaan pendidikan tinggi harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat *outward looking* yaitu melakukan *benchmarking* dan *networking* dengan berbagai perguruan tinggi ternama di dunia. Sebagian perguruan tinggi yang mampu perlu didorong untuk menggunakan standar internasional, baik standar kompetensi, kualitas profesor, manajemen, pembiayaan, riset dan pengembangan, kualitas sarana-prasarana, maupun kerjasama industri (Ished, 2010: 7-8).

Berkaitan dengan layanan pendidikan tinggi menurut Dirjen Pendidikan Nasional dalam buku tentang rencana strategi kebijakan pendidikan tahun 2010-2014 menyatakan bahwa tujuan kebijakan pendidikan tinggi meliputi aspek:

1. Terbangunnya sistem Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang efektif dan efisien seperti:
 - a. Mereposisi dan mereformasi struktur dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b. Menyiapkan dan menyempurnakan landasan hukum pengembangan sektor pendidikan tinggi yang kondusif.
2. Ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan, diantaranya:
 - a. Melakukan diversifikasi mandat perguruan tinggi.
 - b. Mengembangkan sumber daya yang berkualitas.

- c. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter.
 - d. Meningkatkan keselarasan hasil perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat.
 - e. Meningkatkan kewirausahaan lulusan.
 - f. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset.
 - g. Mengawal implementasi program strategis nasional secara berkelanjutan.
 - h. Mendorong dan memfasilitasi internasionalisasi pendidikan tinggi.
 - i. Memperkuat sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
3. Keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi, meliputi:
- a. Meningkatkan aksesibilitas calon mahasiswa dan mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau mahasiswa dalam bidang ilmu yang strategis.
 - b. Mendayagunakan berbagai sumber daya untuk meningkatkan cakupan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
 - c. Memperbaiki ekuitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dan daerah yang kurang terwakili.
 - d. Optimasi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - e. Meningkatkan peran masyarakat terutama dunia usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan kesetaraan.
 - f. Meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dan pendidikan jarak jauh terkait dengan perluasan akses yang berkualitas, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan pendidikan berkelanjutan.
4. Mewujudkan perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel, seperti:

- a. Mereposisi dan mentransformasi struktur dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b. Mendorong pembangunan sistem kelembagaan perguruan tinggi yang mandiri.
 - c. Memperkuat dan menyetatkan perguruan tinggi badan hukum pendidikan.
 - d. Memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
5. Interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan, meliputi:
- a. Memberdayakan masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi.
 - b. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi pada pembangunan masyarakat dan pencapaian MDGs yaitu memberdayakan masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi.
 - c. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi pada pembangunan masyarakat dan pencapaian MDGs (Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012: 4-12).

Sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi dilakukan melalui kegiatan pokok sebagai berikut: (1) Meningkatkan proporsi dosen yang berpendidikan pasca sarjana; (2) Meningkatkan penyelenggaraan program pasca sarjana dalam pengelolaan dan daya tampung; (3) Meningkatkan mutu dan kapasitas program S-1 dan diploma; (4) Mengadakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan; (5) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian melalui peningkatan kualitas tenaga peneliti dan pemantapan sistem kompetitif berjenjang; (6) Mendorong kerja sama penelitian dan pengembangan hasil penelitian antarperguruan tinggi, antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian/dunia usaha baik nasional maupun internasional, khususnya untuk mendukung sumber daya lokal; (7) Memberdayakan stakeholder pendidikan tinggi dalam mendukung penyelenggaraan dan evaluasi kualitas

pendidikan tinggi; (8) Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk kemaslahatan masyarakat; (9) Meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler; dan (10) Meningkatkan kerja antara LPTK, Sekolah dan instansi terkait lainnya sebagai upaya penyegaran pengalaman mengajar dan peningkatan kualitas proses pembelajaran (Program Pembangunan Nasional 2002).

D. Studi Kasus Kebijakan Pendidikan di Indonesia



8 KEBIJAKAN MENDIKBUD NADIEM MAKARIM SOAL WORK FROM HOME

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara di kantor pusat. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 maret 2020. Dalam surat itu, tercantum delapan poin pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Pertama untuk menunda penyelenggaraan acara yang bersifat mengundang banyak peserta. Kedua, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, serta pimpinan unit lainnya untuk bertanggung jawab atas pencegahan sekaligus penanganan Covid-19. Ketiga, pimpinan dan pegawai diwajibkan beristirahat di rumah. Kelima, pegawai Kemendikbud yang menggunakan transportasi publik, akan di sediakan alat transportasi penunjang untuk datang ke kantor. Keenam, pengelola sistem persuratan adaan dokumentasi elektronik harus menjaga sistem dengan baik agar dapat digunakan untuk bekerja dari jarak jauh. Ketujuh, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk berkoordinasi dengan Biro umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta tanda tangan elektronik melalui SINDE, digital documents, video conference, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kedelapan, berisi kebijakan ini yang mulai berlaku dari tanggal 16 Maret 2020. Hal tersebut juga di tegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Ia menyatakan jika sesuai arahan dari Presiden Jokowi, untuk tetap bekerja secara normal dari rumah. —Koordinasi dan rapat – rapat akan dilakukan secara virtual melalui video konferensi dan telepon. Hal itu dilakukan untuk mengurangi pembatasan interaksi atau social distancing, l paparnya.

Nadiem juga mengimbau kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan Kemendikbud untuk selalu mentaati arahan dan aturan protokol kesehatan yang telah di sampaikan pemerintah. Sejumlah kebijakan memang terus dilakukan oleh pemerintah terkait merebaknya Covid-19 di Indonesia, khususnya Jakarta. Kebijakan Work From Home tersebut memang bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintahan dan juga maayaramat luas pada umumnya. Selain itu, untuk memastikan Pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya masing – masing secara efektif.

Sumber : <https://kabar24.bisnis.com/read/20200317/15/1214643/8-kebijakan-mendikbud-nadiem-makarim-soal-work-from-home>

E. Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

1. Tujuan pokok kebijakan pendidikan menengah sebagai usaha untuk menciptakan pendidikan yang siap kerja. Jelaskan pernyataan tersebut !
2. Metode perumusan kebijakan pendidikan salahsatunya melalui metode status quo yaitu metode memilih alternatiff tertentu dalam pengambilan kebijakan. Berikan contoh dari pernyataan tersebut !
3. Berikan3 perbedaan tentang pendekatan dalam perencanaan kebijakan yaitu *Social Demand Approach* dan *Man-Power Approach* !

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kompetensi Dasar :

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu :

1. Memahami makna evaluasi kebijakan dalam dunia pendidikan.
2. Mengidentifikasi Evaluasi Kebijakan
3. Menyebutkan contoh evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, perlu di monitoring dan di evaluasi.

Monitoring merupakan kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Sedangkan evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

A. Konsep Dasar Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Robbin (Sugandha, 1999: 150) menyatakan monitoring merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Sedangkan menurut Terry (Sujamto, 1986:

17) memberikan istilah monitoring dengan pengawasan yang artinya adalah segala sesuatu untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Maka, monitoring memiliki pengertian sebagai suatu aktivitas untuk menentukan apa yang telah dicapai, yang kemudian dilanjutkan pada evaluasi untuk menindaklanjutinya. Dalam melakukan monitoring terdapat beberapa metode untuk melakukan pengawasan kebijakan pendidikan, antara lain: 1) Metode Dokumentasi, yakni dari berbagai laporan kegiatan, seperti laporan tahunan/semseteran/bulanan. 2) Metode Survei, seperangkat instrumen pertanyaan disiapkan sebelum melakukan survei, tujuannya menjangkau data dari *stakeholders*, terutama kelompok sasaran. 3) Metode Observasi Lapangan, mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. 4) Metode Wawancara pada para *stakeholders*, pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan. 5) Metode Campuran, misalnya antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas. 6) *Focus Group Discusson* (FGD), melakukan pertemuan dan diskusi dengan para *stakeholder* yang bervariasi. Dengan cara demikian maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber (Subarsono, 2005: 114-115).

Melalui metode di atas, pada dasarnya melakukan monitoring juga memiliki pendekatan tertentu (William Dunn, 2003: 519), antara lain:

1. Jenis-jenis Pengendalian.

Pendekatan pemantauan dapat berbeda dalam pengendaliannya (kontrol) atas tindakan kebijakan. Hanya satu pendekatan

(yakni eksperimentasi sosial) yang secara langsung mengontrol masukan dan proses kebijakan. Pendekatan yang lain —mengontrol masukan dan proses dengan menentukan setelah tindakan berapa banyak variasi hasil kebijakan yang merupakan akibat dari masukan dan proses, dibandingkan dengan faktor eksternal yang tidak secara langsung berkaitan dengan tindakan kebijakan.

2. Jenis- jenis Informasi yang Dibutuhkan.

Pendekatan pemantauan dapat pola berbeda menurut informasi yang mereka perlukan. Beberapa pendekatan (yakni eksperimentasi sosial dan auditing sosial) mengharuskan dikumpulkannya informasi baru. Akuntansi sistem sosial dapat saja tidak membutuhkan informasi baru semacam ini, sedangkan sintesis riset-praktek mendasarkan diri sepenuhnya pada informasi yang tersedia saja (tidak usah menggali data).

Sementara itu, pengertian evaluasi menurut Gronlund adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauhmana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran (Jurnal Media Edukasi Pendidikan Teknologi dan Kejuaran, 2010: 76).

Adapun argumen McDonald (John D Mc.Neil, 1990: 69) berpendapat bahwa *evaluation is the process of conceiving, obtaining and communicating information for the guidance of educational decision making with regard to a specified programm.* Hal senada diargumenkan oleh Stake tentang konsep *responsive evaluation*, yaitu pada hakikatnya evaluasi yang responsive, apabila secara langsung berorientasi pada kegiatan-kegiatan program, memberikan sambutan terhadap informasi yang diperlukan oleh audiens, dan nilai perspektifnya disajikan dalam laporan tentang keberhasilan program/kurikulum (Stake E Robert, 1967: 68).

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1981 : 3) definisi evaluasi —*evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some object.* Artinya bahwa evaluasi merupakan sistem

penilaian dari sebuah obyek penelitian (informasi tentang suatu data). Dalam evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu: adanya sebuah proses (*process*), perolehan, penggambaran, penyediaan informasi yang berguna, dan alternatif keputusan.

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Suharsimi & Cepi (2006 : 2), bahwa:

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Anderson (Suharsimi & Cepi, 2006: 1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka evaluasi adalah sistem penilaian dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan evaluasi hanya didasarkan pada hasil pengukuran, dapat pula didasarkan pada suatu hasil pengamatan.

Secara garis besar berdasarkan penjelasan di atas, antara monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut mengenai perbedaan masing-masing.

Tabel 5.1. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi

No	Monitoring	Evaluasi
1.	Hanya memotret saja, mencatat apa adanya tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diamati/saksikan, dan apa yang dilakukan	Menilai dengan membandingkan antara apa yang mestinya dilakukan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi
2.	Waktunya bisa kapan saja sejak awal sampai akhir	Waktunya ditentukan setelah kegiatan diperkirakan telah menghasilkan sesuai target.
3.	Kriteria tenaga tidak memerlukan syarat khusus, namun tetap harus mengikuti <i>coaching</i> pemahaman	Perlu syarat tertentu, yaitu menguasai kompetensi sesuai dengan apa yang akan di supervisi
4.	Petugas tidak perlu memberi komentar yang sifatnya membenarkan atau menyalahkan	Petugas bisa memberi komentar sepanjang dia yakin apa yang disampaikan sesuai ketentuan (Untuk Independen Dilarang)
5.	Fungsinya untuk menjamin bahwa kegiatan akan sesuai ketentuan (preventif) atau untuk masukan guna pembinaan yang berwenang	Fungsinya menilai keberhasilan kegiatan berupa membandingkan antara tujuan dengan hasil yang dicapai atau antara program dengan pelaksanaannya

Sumber: Wakhinuddin S (<https://wakhinuddin.wordpress.com>)
 Sedangkan tujuan evaluasi menurut Suharsimi & Capi (2006 : 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal senada juga diargumenkan oleh Ali Imron (2008: 35) bahwa adanya evaluasi kebijakan dilakukan dengan maksud untuk:

- 1) Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak;
- 2) Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan atau belum;
- 3) Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijaksanaan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional dimana kebijakan tersebut dilaksanakan;
- 4) Mengetahui seberapa jauh suatu rumusan kebijakan telah dapat diimplementasikan;
- 5) Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan;
- 6) Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap khalayak yang bermaksud dituju oleh kebijakan, dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijakan;
- 7) Mengetahui apakah resiko-resiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak; dan
- 8) Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijakan.

B. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Adapun ruang lingkup evaluasi kebijakan meliputi evaluasi perumusan, implementasi, lingkungan dan evaluasi kinerja. *Pertama*, evaluasi perumusan formulasi kebijakan berkenaan

dengan: (1) penggunaan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, (2) mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, dan (3) pendayagunaan sumberdaya yang optimal. Teknik yang dipakai dalam evaluasi ini adalah model-model perumusan formulasi kebijakan seperti yang telah diuraikan di atas. *Kedua*, evaluasi implementasi kebijakan bertujuan untuk melihat kesesuaian antara jenis kebijakan yang harus diimplementasikan dan metode implementasi yang tepat. Sebagai contoh, untuk konteks Indonesia, implementasi kebijakan kartu penduduk dapat dilakukan dengan metode atau pendekatan administratif. Implementasi kebijakan biaya pendidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan politik. Kebijakan pe-nanggulangan kemiskinan lebih tepat diimplementasikan metode eksperimen. Kebijakan gender lebih efektif diimplementasikan dengan metode simbolik. *Ketiga*, evaluasi lingkungan yaitu evaluasi sebuah deskripsi bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan kenapa kebijakan seperti itu serta faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil di-implementasikan. *Keempat*, evaluasi kinerja yaitu evaluasi untuk mendapatkan gambaran pencapaian suatu kebijakan dibandingkan dengan target atau rencana pencapaian yang diharapkan. Metode yang dapat dipergunakan dalam evaluasi ini adalah analisis kesenjangan.

Dalam melakukan evaluasi terdapat rangkaian proses melakukan analisis. Maka, dalam menganalisis kebijakan dilakukan dengan dua pendekatan di bawah ini:

- 1) Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif sebagai pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan menyajikan

keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan yang perlu diketahui oleh para pemakai.

- 2) Pendekatan normatif sering disebut pendekatan preskriptif yaitu upaya mengevaluasi sesuai norma, kaidah atau —resep— yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini untuk mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah (Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar, 1993: 46).

Disamping itu terdapat argumen yang berbeda bahwa pendekatan evaluasi kebijakan meliputi 2 aspek berikut (Sudiyono,1992):

- 1) Pendekatan kepatuhan yaitu apabila para pelaksana mematuhi semua petunjuk atau aturan yang diberikan maka implementasi sudah dinilai berhasil. Kemudian pendekatan ini disempurnakan lagi dengan adanya pengaruh : a) ekstern, kekuatan non birokrasi dalam pencapaian tujuan, b) intern, program yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kebijakan sering tidak terdesain dengan baik sehingga perilaku yang baik dari para pelaksana (birokrasi) tetap tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan.
- 2) Pendekatan perspektif yaitu mengenai *what's happening* (apa yang terjadi). Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dari seluruh aspek karena implementasi kebijakan melibatkan beragam variabel dan faktor. Berdasarkan perbedaan kedua pendekatan di atas, maka Bingham dan Felbinger (Riant Nugroho, 2013:542) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu:
 - a) Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
 - b) Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.

- c) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
- d) Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Demikian pula hal serupa oleh Finsterbusch dan Motz (Samudra Wibawa, 1994: 22) bahwa terdapat 4 (empat) jenis evaluasi kebijakan yaitu :

- a) *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analisis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
- b) *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
- c) *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.
- d) *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Keempat jenis evaluasi tersebut, mengarahkan kita pada kriteria atau parameter yang akan dianalisis dalam kebijakan pendidikan. Menurut William N. Dunn (2003:78-79) mengemukakan beberapa kriteria atau parameter dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan, meliputi enam aspek:

Tabel 5.2. Parameter Evaluasi Kebijakan

No	Parameter Evaluasi Kebijakan Pendidikan	Konsep Parameter
1.	Efektifitas (<i>effectiveness</i>).	Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. (Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?)
2.	Efisiensi (<i>efficiency</i>).	Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. (Seberapa banyak usaha yang ingin diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?)
3.	Kecukupan (<i>adequacy</i>).	Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas

		<p>memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.</p> <p>(Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?)</p>
	<p>Perataan (<i>equity</i>). Erat legal dan sosial dan menun- usaha antara kelompok-kelompok masyarakat. Kebijakan adalah</p>	<p>berhubungan dengan rasionalitas menunjuk pada distribusi akibat dan yang berorientasi pada perataan</p> <p>kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik</p>

		<p>etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.</p> <p>(Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata dengan kelompok-kelompok yang berbeda?).</p>
5.	<p>Responsivitas (<i>responsiveness</i>)</p>	<p>berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.</p> <p>(Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?)</p>
6.	<p>Ketepatan (<i>appropriateness</i>).</p>	<p>Kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih</p>

		<p>kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asusi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. (Apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?)</p>
--	--	--

C. Refleksi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.



PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA NEW NORMAL

Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang terdampak oleh pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Menyikapi hal tersebut, Mendikbud menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 yang berisi beberapa kebijakan yang diambil selama Pandemi Covid-19, antara lain; dibatalkannya Ujian Nasional 2020, pembelajaran yang awalnya menggunakan tatap muka di sekolah diubah menjadi Belajar Dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menggunakan moda daring atau online. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan dan wisuda pun dilakukan secara daring.

Ada beberapa aplikasi daring yang bisa menjadi alternatif sumber belajar, seperti Rumah Belajar, TV [Edukasi](#), Ruang Guru, dan sebagainya. Pada masa PJJ, kegiatan pembelajaran tidak dipaksakan agar seluruh target kurikulum tercapai, tetapi lebih menekankan kepada penanaman kecakapan hidup (life skill) dalam menghadapi Covid-19, pengalaman bermakna, dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Proses penjaminan mutu di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan (TPMPS). Walau demikian, TPMPS perlu mendapatkan dukungan dan bimbingan dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD). TPMPD terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Dewan Pendidikan, baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, tugas dari TPMPD Kabupaten/Kota dan Provinsi yaitu; (1) melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan, (2) memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan, (3) menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan.

Sumber: <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/5ed93136d541df4e5c0fc402/penjaminan-mutu-pendidikan-di-era-new-normal?page=all>

D. Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

1. Monitoring hanya memotret saja, mencatat apa adanya tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dia-mati/saksikan, dan apa yang dilakukan. Jelaskan pernyataan tersebut !
2. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu !
3. Menganalisis kebijakan dapat dilakukan melalui pendekatan deskriptif yaitu suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Berikan contoh nya dari pendekatan tersebut !

DAFTAR PUSTAKA

- Atmarizon, D & Zaim, M. 2016. —The Implementation of Scientific Approach in Teaching English at the Tenth Grade of Senior High School 7 Padang. *UNP Journal* xvii(1):1–18.
- Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Akhmad Sudrajat. 2008. *Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik dan Model Pembelajaran*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Ali Imron. 2008. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, James E. 2003. *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Atelia M, Amy C dan Martin. 2007. *Community-Based Learning Engaging Students for Success and Citizenship Coalition for Community Schools with Generous Support from The Charles Stewart Mott Foundation Coalition for Community Schools*.
- Arif Rohman. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Arif S. Sardiman, dkk. 1996. *Media Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Ali Imron. 2008. *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Beringer, Jason. 2007. —Application of Problem Based Learning through Research Investigation Journal of Geography in Higher. *Journal of Geography in Higher Education* 31(3):445–57.
- Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP). 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Carla Rindi Lestari (<https://www.scribd.com/doc/274282911/pertemuan3ktsp>) di unduh pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 20.30 WIB.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2012. *Rencana Strategis 2010-2014*. Jakarta: Dikti.
- Darmaningtyas. 1993. *Pendidikan Pra dan Setelah Krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdikbud*. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah Dengan Pendidikan Agama di Sekolah Umum. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi II*. Jakarta: Balitbang Pusat Kurikulum.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbang Pusat Kurikulum.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010 . *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan Menengah Universal*.
- De Porter. 2000. *Quantum Learning:Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas*. Bandung: Kaifa.
- Doni Koesoema A. 2007. *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Everett M, Rogers. 2003. *Diffusion of Innovation 5th Edition*. New York: Free Press.
- E.Mulyasa. 2005. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- E.Mulyasa. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Endang.W. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jurnal Ilmu Administrasi No. 1 Volume 1 2008.
- Fatchul Mu'in. 2011. *Pendidikan Karakter, Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fogarty, Donald W., dkk. 1991. *Production & Inventory Management*. United States of America: South-Western Publishing Co.
- Framework for the education strategy for malta 2014-2024: *Sustaining foundations, creating alternatives, increasing employability*
- Gandasari, M. 2019. —Pengembangan Model Pembelajaran Tematik Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Untuk Sekolah Dasar. | *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia* 15(1):22–27.
- Hadi Subroto, T, 1998, *Pembelajaran Terpadu, Materi Pokok PGSD*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Hasibuan, Moedjiono. 1986. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: penerbit remaja karya
- Hilgard, E R dan Bower G H. 1975. *Theories of learning. Englewood Cliffs*. New York: Prentice-Hall.
- Husaini Usman. 2010. *Manajemen, Edisi 3*. Jakarta: Bumi Aksara.

- H.A.R Tilaar. 2009. *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayah, N. 2015. —Pembelajaran Tematik Integratif Di Sekolah Dasar. *|| Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 2(1):34–49.
- Hmelo-silver, Cindy E. 2014. —Problem-Based Learning : What and How Do Students Problem-Based Learning : What and How Do Students Learn ? *||* (January 2004).
- Indriani, F. 2015. —Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Dalam Mengelola Pembelajaran Tematik Integratif Kurikulum 2013 Pada Pengajaran Micro Di PGSD UAS Yogyakarta. *|| Profesi Pendidikan Dasar* 2(2):87–94.
- Irianto, Yoyon B. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- I* Wayan Santyasa. 2003. *Makalah* disajikan dalam workshop media pembelajaran bagi guru-guru Pasal 40, Ayat (2) tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- John D McNeil. 1990. *Curriculum: A Comprehensif Introduction*. London: Scott, Foresman/Litle, Brown Higher Education.
- Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, —Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Pedoman Sekolah *||*, (hlm.9).
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. —No Title. *||* Pp. 1–15 in *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mark Brundrett and Dr Diane Duncan. 2010. *Leading curriculum innovation in primary schools*. Liverpool: John Moores University.
- Muslich, Masnur. 2008. *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Masnur Muslich. 2011. Pendidikan Karakter Menjawab tantang Krisis Multidimensional. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masnur Muslich. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nanang Fattah. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noeng.Muhajir. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Nyoman Dantes. 2008. *Perspektif Dan Kebijakan Pendidikan Menghadapi Tantangan Global*. Makalah Disampaikan pada Seminar Akademik Jurusan PGSD (S1) FIP-Undiksha 28 Mei 2008.
- Nurkholis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurdyansyah & Musfiqon. 2015. *Pendekatan Pembelajaran Saintifik*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Pendidikan, Menteri, D. A. N. Kebudayaan, and Republik Indonesia. 2014. —Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Pp. 1–6 in *PERATURANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 57TAHUN 2014*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Putu Sudira. *Tujuh Prinsip Dasar Pendekatan Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta: Pendidikan Teknik Elektronika FT UNY (core.ac.uk/download/pdf/11059150.pdf) diunduh pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 18.30 WIB.
- Patton, Carl V. & Sawicki, Davis S. 1986. *Basic method of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Practice Hall.
- Pervaiz dan Charles D. 2010. *Innovation Management, Context, Strategies, Systems and Process*.
- Riant Nugroho. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Roger A. Kaufman. 1972. *Educational System Planning*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Roestiyah. 2008. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmatik, U. & Amrizal. 2017. —Pemetaan Pembelajaran Biologi Berbasis Scientific Approach Di Sma Negeri 1 Binaji. *Jurnal Pelita Pendidikan* 6(1):28–35.
- Susilana, Rudi, and Heli Ihsan. 2014. —Pendekatan Saintifik Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Berdasarkan Kajian Teori Psikologi Belajar. *Edutech* 1(2):183–95.
- Skogen, Kjell. 1997. *An Introduction to the Process of Innovation. Chapter II in DSSIproject. Socrates Programme* 25234CP-1-96-NO ODL(<http://www.uoc.es/dssi/>) diunduh pada tanggal 23 Agustus 2015 pukul 14.15 WIB.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Anitah. 2003. *Pembelajaran Terpadu Implementasi, Implementasi Paradigma Konstruktivistik Dalam Rangka Pengembangan Kecerdasan Ganda*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Stake E Robert. 1967. *The Countenance of Education Evaluation*. Teacher College.
- Syafaruddin dan Anzinzhan. 2008. *Sitem Pengambilan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: Grasindo Persada.
- Syafaruddin. 2005. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Slamet PH. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Paartisipasi, Transparansi, Akuntabilitas dan Income Generating activity dalam buletin pelangi pendidikan edisi v Agustus 2006*.

- Subiyat Tartono. 2006. *Inovasi Kemampuan Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar*. (Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 1 TH. XXXIX Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Negeri Singaraja).
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subandi. 2005. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sugandha, Dann. 1999. *Kepemimpinan di dalam organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyanto. 2008. Model-model pembelajaran Inovatif. Surakarta: Panitia PLPG.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengantar Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Samudra Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Stufflebeam, D.L. dan Shinkfield, A.J. 1985. *Systematic evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Susento (<http://p4-usd.blogspot.co.id/2009/04/pendekatan-dan-strategi-pembelajaran.html>) diunduh pada tanggal 12 September 2015 pukul 16.00WIB.
- Trianto. 2010. *Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respectand Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
- Udin Syaefudin S. 2013. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Udin Syaefudin S dan Mulyani Sumantri. *Pendidikan Dasar dan Menengah*.
(http://file.upi.edu/direktori/fip/jur._administrasi_pendidikan/195306121981031-udin_syaefudin_sa'ud/pendidikan_dasar_%28udin_sa'ud%29.pdf) diunduh pada tanggal 26 September 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. *UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Medya Duta.
- Vesa Taatila. 2004. *The Concept of Organizational Competence-A Foundational Analysis*, Dissertation Department of Information Technology of University of Jyväskylä Finland
- Wahyuni, H.T, Setyosari, P & Kuswandi, D. 2016. —Implementasi Pembelajaran Tematik Kelas 1 SD. || *Edcomtech* 1(2):129–36.
- Wina Sanjaya. 2008 *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana.
- Wagiran. 2005. *Pentingnya Reorientasi Pembelajaran dalam Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi FT Universitas Negeri Yogyakarta* (Jurnal Cakrawala Pendidikan, november, th. xxiv, no. 3 tahun 2005).
- Waseso, Hendri Purbo. 2018. —Kurikulum 2013 Dalam Prespektif Teori Pembelajaran Konstruktivisme. || *Ta'lim* 1(1):59–72.

INDEKS

D

Daring, 117

Difusi, 5

G

Guru, 45, 59, 60, 113, 117

H

Hayat, 31

I

Inovasi, i, iii, iv, v, vii, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 42, 62, 113, 114

K

KBK, 20, 21, 25, 26, 27, 36, 46, 49 KBM, 49

Kebijakan, i, iii, iv, vi, viii, 66, 68, 77, 80, 81, 83, 84, 86, 91, 93, 99, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114

Kompetensi, v, vii, viii, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 36, 37, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 58, 63, 92, 107, 109, 110, 111, 112, 115

KTSP, 20, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 111

kurikulum, v, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 44, 57, 58, 59, 61, 71, 74, 76, 77, 85, 95, 109

L

LPTK, 90

M

MBS, 34

Menanya, 39

Mengamati, 39

Mengasosiasi, 40

Monitoring, viii, 93, 97, 98, 106

P

pembelajaran, v, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 77, 82, 85, 88, 90, 95, 111, 114

pendidikan dasar, v, vi, 28, 80, 82, 83, 84

pendidikan menengah, v, vi, 28, 80, 81, 84, 85, 86

S

Scientific, 108, 113

T

Tematik, vij, 56, 57, 58, 60, 110, 111, 114, 115

TENTANG PENULIS

Dr. MEIDAWATI SUSWANDARI, S.Pd, M.Pd.

Lahir di Purbalingga, 12 Mei 1987. Penulis merupakan istri seorang prajurit Angkatan Darat yang bertugas di Asrama Militer Yonif Mekanis Raider 413 Sukoharjo. Penulis memperoleh gelar Sarjana Pendidikan jurusan S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi di Universitas Sebelas Maret Surakarta/UNS (2009). Gelar Magister Pendidikan diperoleh dari S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di UNY Yogyakarta (2012). Sementara itu, gelar Doktor diperoleh dari S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (2020). Penulis mengawali karir sebagai pengajar pada tahun 2013 di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Penulis mengawali kegiatan pena semenjak SMP. Beberapa tulisan yang pernah dimuat seperti puisi dan artikel yaitu di Majalah PD Sahabat (2004) dan Majalah Orientasi Pelajar/MOP (2005). Buku yang pernah ditulis yaitu Kewirausahaan, Filsafat Ilmu, Ontologi Puisi, Dialek Banyumasan sebagai Konstruksi Budaya, Panduan Classmaker bagi Pembelajaran IPS, Panduan Daring Learning, Metode Penelitian PGSD/PGMI, Model Problem Based Learning Berbasis Budaya Akademik (PBL-BA), dan Sosiologi Pendidikan.